

**EFEKTIVITAS MAJELIS *ŞULĤ* DALAM MEMEDIASI  
PERTIKAIAN KELUARGA DI MAHKAMAH SYARIAH  
SELANGOR**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**AZFAR NAUFAL BIN SAIFUL NIZZAM**

**NIM. 160101129**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1440H/2019M**

**EFEKTIVITAS MAJELIS *ṢULḤ* DALAM MEMEDIASI PERTIKAIAN  
KELUARGA DI MAHKAMAH SYARI'AH SELANGOR**

**SKRIPSI**

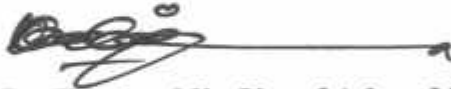
**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:**

**AZFAR NAUFAL BIN SAIFUL NIZZAM  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Nim:160101129**

**Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyah**

**Pembimbing I,**



**Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL  
NIP: 196207192001121001**

**Pembimbing II,**



**Muhammad. Iqbal, MM  
NIP: 197005122014111001**

**EFEKTIVITAS MAJELIS *ṢULḤ* DALAM MEMEDIASI PERTIKAIAN  
KELUARGA DI MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

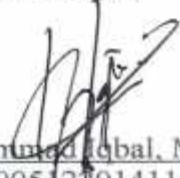
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 29 Januari 2019 M  
23 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL  
NIP:196207192001121001

Sekretaris,

  
Muhammad Iqbal, MM  
NIP:197005122014111001

Penguji I,

  
Dr. H. Nasaiv Aziz, MA  
NIP:195812311988031017

Penguji II,

  
Riadhus Sholihin, S.Sy., MH  
NIP:2001119301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh

  
  
Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam  
Nim : 160101129  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelarak akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019  
Yang Menyatakan



Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam

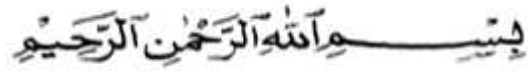
## ABSTRAK

Nama : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam  
Nim : 160101129  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam Memediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor  
Tanggal Munaqasyah : 29/1/2019  
Tebal Skripsi : 84 halaman  
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

Kata Kunci : *Efektivitas, Majelis Ṣulḥ, Pertikaian, Mahkamah Syari'ah*

Pertikaian sering terjadi dalam rumah tangga apabila melibatkan pasangan suami istri. Ia terjadi apabila salah satu pihak memaksa pihak lain menerima pendapat dan kehendaknya kemudian pihak ini terasa tergugat dengan pihak penggugat. Justru itu diwujudkan Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah dalam menyelesaikan pertikaian suami istri untuk mencari jalan kesepakatan. Rumusan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola yang di terapkan dan bagaimana efektivitas Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Selangor. Metode dalam penelitan ini menggunakan metode kualitatif berarti penelitian yang menekankan pada kualitas suatu jasa. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Majelis *Ṣulḥ* adalah suatu majelis musyawarah di antara suami dengan istri dan di ketuai oleh Pegawai *Ṣulḥ*. Secara umumnya *Ṣulḥ* merupakan penyelesaian suatu pertikaian antara pihak yang bertikai dalam suatu kasus dengan persetujuan bersama antara mereka sendiri dan bukan diputuskan oleh pihak ketiga. *Ṣulḥ* merupakan salah satu kaedah perdamaian yang efektif kepada pihak bertikai karena ia dapat menghematkan waktu dan biaya selain pola persidangan yang sering berlanjutan dan mengambil waktu yang lama serta biaya yang tinggi. Pola yang diterapkan Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Selangor dapat membuktikan bahwa adanya efektivitas dalam mengurangi peningkatan kasus tertunda yang mengikat Mahkamah Syari'ah selama ini. Kesuksesan suatu kasus di Majelis *Ṣulḥ* juga disebabkan banyak bergantung kepada pola yang diterapkan dan faktor pihak yang bertikai. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa kemampuan Mahkamah Syariah dapat dinaikkan melalui kasus tertunda yang berhasil diselesaikan dan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap pihak Mahkamah Syari'ah. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian secara *Ṣulḥ* ini sangat dianjurkan karena dapat memuaskan hati pihak bertikai berbanding di persidangan yang tidak dapat memberi kepuasan kepada pihak bertikai serta pola yang diterapkan sangat efektif di Majelis *Ṣulḥ* karena penyelesaian di Majelis *Ṣulḥ* ini adalah (*win-win solution*) tiada pihak yang kalah atau rugi.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua umumnya, dan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam Memediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syari’ah Selangor”**

Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah Swt.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada bapak Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., selaku pembimbing I dan Muhammad Iqbal, MM., selaku pembimbing II, di mana pada saat-saat kesibukan beliau menjadi dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum masih dapat menyisihkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang ditargetkan. Juga kepada bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan HK, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang memberikan pelayanan pinjaman buku-buku yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Kemudian dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Umiminarni Binti Dasuki dan Ayahanda Saiful Nizzam Bin Abdul Rahman yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga kejenjang pengajian tinggi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun dari semua pihak senantiasa dinantikan demi memperbaiki penulisan skripsi ini. Semoga dari perbaikan skripsi ini akan bermanfaat dan mempunyai nilai guna bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin.. Billaḥi taufiq wal hidayah...*

Banda Aceh, 16 Jan 2019  
Penulis,

**Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam**

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16  | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | b                  |                            | 17  | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | t                  |                            | 18  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | ṡ                  | s dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | j                  |                            | 20  | ف    | f     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | q     |                            |
| 7   | خ    | kh                 |                            | 22  | ك    | k     |                            |
| 8   | د    | d                  |                            | 23  | ل    | l     |                            |
| 9   | ذ    | ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | 24  | م    | m     |                            |
| 10  | ر    | r                  |                            | 25  | ن    | n     |                            |
| 11  | ز    | z                  |                            | 26  | و    | w     |                            |
| 12  | س    | s                  |                            | 27  | ه    | h     |                            |
| 13  | ش    | sy                 |                            | 28  | ء    | ’     |                            |
| 14  | ص    | ṡ                  | s dengan titik di bawahnya | 29  | ي    | y     |                            |
| 15  | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |     |      |       |                            |

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u           |

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ◌َ            | <i>Fathah</i> dan ya  | ai             |
| ◌َ◌ُ            | <i>Fathah</i> dan wau | au             |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| / ◌َ             | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | ā               |
| ◌ِ               | <i>Kasrah</i> dan ya                  | ī               |
| ◌ُ               | <i>Dammah</i> dan wau                 | ū               |

Contoh:

= *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

|                                                             | Halaman |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1 Skema Alur Kerja <i>Şulh</i>                        | 45      |
| Tabel 2 Statistik Keseluruhan Kasus <i>Şulh</i> 2013- 2017  | 54      |
| Tabel 3 Persentase Keseluruhan Responden Menjawab Kuesioner | 59      |

## **DAFTAR DIAGRAM**

|                                                               | Halaman |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Diagram 1 Grafik Statistik Keseluruhan Kasus Sulh             | 55      |
| Diagram 2 Grafik Persentase Responden Yang Menjawab Kuesioner | 60      |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing

LAMPIRAN 2 Surat Penelitian dari Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

LAMPIRAN 3 Surat Kelulusan Permohonan Data dari Mahkamah Syari'ah Selangor

LAMPIRAN 4 Gambar Penelitian

LAMPIRAN 5 Kasus yang Berhasil dan Kasus yang Gagal

LAMPIRAN 6 Arahan Amalan

LAMPIRAN 7 Kuesioner

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL.....</b>                                                                                                 | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>                                                                                          | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>                                                                                             | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>                                                                               | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                       | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                                          | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>                                                                                                 | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                                                | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                     | <b>xiv</b>  |
| <br><b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>                                                                                            |             |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....                                                                                           | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                                                                                  | 6           |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                                                                                | 6           |
| 1.4. Penjelasan Istilah.....                                                                                               | 7           |
| 1.5. Kajian Pustaka.....                                                                                                   | 11          |
| 1.6. Metode Penelitian.....                                                                                                | 12          |
| 1.7. Sistematika Pembahasan.....                                                                                           | 17          |
| <br><b>BAB DUA PERSPEKTIF UMUM TENTANG <i>ŞULĦ</i></b>                                                                     |             |
| 2.1. Pengertian <i>ŞulĦ</i> .....                                                                                          | 19          |
| 2.2. Sejarah Pelaksanaan <i>ŞulĦ</i> .....                                                                                 | 21          |
| 2.3. Asas Praktek <i>ŞulĦ</i> .....                                                                                        | 24          |
| 2.4. <i>ŞulĦ</i> di Dalam Perundangan Islam di Malaysia .....                                                              | 29          |
| 2.5. Akibat Hukum Dalam <i>ŞulĦ</i> .....                                                                                  | 35          |
| <br><b>BAB TIGA EFEKTIFIVAS MAJELIS <i>ŞULĦ</i> DALAM MEMEDIASI<br/>PERTIKAIAN KELUARGA DI MAHKAMAH SYARI'AH</b>           |             |
| 3.1. Gambaran Umum Majelis <i>ŞulĦ</i> di Mahkamah Syari'ah<br>Selangor.....                                               | 38          |
| 3.2. Dasar Hukum dan Kewenangan Majelis <i>ŞulĦ</i> Mahkamah<br>Syari'ah Selangor.....                                     | 43          |
| 3.3. Pola yang di Terapkan Majelis <i>ŞulĦ</i> dalam Mediasi<br>Pertikaian Keluarga Mahkamah Syari'ah Selangor.....        | 46          |
| 3.4. Efektivitas Pelaksanaan Majelis <i>ŞulĦ</i> dalam Memediasi<br>Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor..... | 52          |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5. Tahap Kepuasan Pihak Bertikai yang Menghadiri Majelis<br><i>Ṣulḥ</i> di Mahkamah Syari'ah Selangor ..... | 57        |
| 3.6. Analisa Penulis.....                                                                                     | 62        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP</b>                                                                                      |           |
| 4.1. Kesimpulan.....                                                                                          | 65        |
| 4.2. Saran.....                                                                                               | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                    | <b>68</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                          | <b>71</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>                                                                             | <b>84</b> |

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah.**

Pada hakikatnya, setiap orang yang membangun rumah tangga berharap untuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Tidak semua kebahagiaan dapat dirasakan karena setiap pasangan memiliki perilaku yang berbeda sehingga tidak ada pemahaman di antara mereka sendiri dan salah satunya mengakibatkan kasih sayang di dalam hubungan antara pasangan berubah dan kasih sayang menjadi berkurang akan menyebabkan terjadinya perceraian sebagai penyelesaian masalah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dituntut untuk menyelesaikan sengketa karena manusia dibekalkan akal dalam menjalani kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sehingga penegakan keadilan dapat diwujudkan. Meskipun tujuan pernikahan bukan untuk perceraian, tetapi penyebab yang berbeda mengakibatkan perceraian.<sup>1</sup>

Pertikaian dan perdebatan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga karena masalah ini tidak asing dalam kehidupan rumah tangga, terutama melibatkan rumah tangga di usia muda. Sejak kebelakangan ini isu di dalam rumah tangga sering terjadi keruntuhan mengakibatkan institusi kekeluargaan semakin hari semakin meningkat kasus, sehingga membawa kepada peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syari'ah. Namun terdapat pola-pola yang dianjurkan oleh Islam untuk

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm.5.



mendapatkan jalan pendamaian.<sup>2</sup> Walaupun, perceraian dibolehkan untuk mengakhiri ikatan suami istri sebagaimana ucapan Ibnu Umar yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق (رواه أبي داود)<sup>3</sup>  
Artinya: “Diriwayatkan Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Ṣhallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”. (Hadist Riwayat Abu Dāūd)

Sebaiknya pihak yang berselisih menemukan jalan solusi sebelum membuat keputusan perceraian di Mahkamah Syari'ah karena perceraian akan merugikan kedua belah pihak. Pihak yang bersengketa diperbolehkan untuk mengajukan perceraian jika mereka merasa bahwa tidak ada jalan penyelesaian dan ketika melanjutkan hubungan suami istri membawa kepada keruntuhan dan kemudharatan.

Untuk mengatasi masalah kekeluargaan di Malaysia khususnya di Provinsi Selangor, Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor dalam usahanya mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga telah mengambil tindakan sewajarnya dengan melaksanakan perlaksanaan layanan penyelesaian sengketa secara *Ṣulḥ* dengan mengikut Enakmen Qanun Prosedur Mal Syariah Selangor No 7 tahun 1991.<sup>4</sup> Negeri Selangor telah memberitakan Kaedah-Kaedah dan Tatacara Mal *Ṣulḥ*

---

<sup>2</sup> Norzulaili Mohd Ghazali, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Alquran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*. (Malaysia: Kolej Universiti Islam Malayisa(KUIM), 2007) hlm.5.

<sup>3</sup> Abu Dāūd Sulaimān, *Sunan Abu Dāūd*, jilid 2, (Beirut: Dār fikih, 2003) hlm.226

<sup>4</sup> Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2001 dan kuasa ini dibawah seksyen 147 (1) (c) ETMMS(S) 2003

Selangor tahun 2001 pada bulan Desember. Dan ditegakkan pada tanggal 1 Mei 2002. Ini adalah usaha Jabatan Kehakiman Syariah agar dapat mengatasi dan mengurangi peningkatan kasus kekeluargaan di pengadilan dan mengatasi kasus yang tertunda dalam persidangan.

*Ṣulḥ* merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengikuti keinginan manusia untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua belah pihak. Perselisihan ini kadang kala diselesaikan sendiri dengan pendamaian melalui pola yang diterapkan dalam perundangan *Ṣulḥ* atau campur tangan orang ketiga. Manusia berusaha untuk menghindari dan keluar dari permasalahan dan persengketaan yang muncul dalam jangka waktu yang lama. Meskipun permasalahan atau persengketaan yang muncul tidak dapat dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan oleh manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk kehidupan yang damai, aman, adil dan sejahtera. Penerapan *Ṣulḥ* dalam menyelesaikan sengketa akan menjadi payung untuk masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian karena dalam *Ṣulḥ* pihak berpartisipasi aktif untuk berupaya mencari jalan penyelesaian terhadap sengketa yang dihadapinya.<sup>5</sup>

*Ṣulḥ* merupakan proses yang dapat mencapai keadilan yang mana tidak ada pihak yang menang atau kalah karena keputusan dibuat dengan persetujuan bersama. Hal ini berbeda dengan keputusan melalui persidangan karena pihak yang lebih

---

<sup>5</sup> Syarizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011) hlm.164.

pandai beralasan cenderung untuk menang yang berarti memperoleh sesuatu yang bukan haknya.<sup>6</sup> Hal yang demikian mendapat ancaman berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ مُحِجَّتَهُ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ أَقْطَعَةً مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)<sup>7</sup>

Artinya: Dari Ummu Salamah Raḍiyallaḥu 'anhā bahwa Rasulullah Ṣhallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Sesungguhnya engkau sekalian selalu mengadukan persengketaan kepadaku. Bisa jadi sebagian darimu lebih pandai mengemukakan alasan daripada yang lainnya, lalu aku memutuskan untuknya seperti yang aku dengar darinya. Maka barangsiapa yang aku berikan kepadanya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, sebenarnya aku telah mengambil sepotong api neraka untuknya. (Hadist Riwayat Bukhari)

Di Malaysia ada pola terkait dengan hukum Syari'ah untuk menyelesaikan suatu kasus yang melibatkan kasus klaim atau permohonan. Seperti kasus melanggar janji untuk menikah atau bertunang, tuntutan-tuntutan yang timbul dari suatu perceraian seperti nafkah idah, nafkah tertunda, harta bersama, tuntutan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dengan melihat kepentingan anak-anak tersebut dalam tempo perkawinan, maupun setelah perceraian, dan lain-lain yang difikirkan sesuai oleh pendaftar.<sup>8</sup> Di dalam sistem hukum undang-undang Mahkamah Syari'ah di negara

<sup>6</sup> Faiṣal bin 'Abdul 'Aziz 'Alu Mubārak , *Būlūghul Marām & Penjelasannya* ,(Jakarta: Ummul Qura ,2015), hlm. 1074-1075.

<sup>7</sup> Abū 'Abdullah Muḥammad, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Bierut: Dār Al-kitab Al-'ilimiyah, 1992), hlm. 454

<sup>8</sup> Seksyen 61 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 1/2003.

Malaysia terdapat aturan tentang penggunaan mediator sebagai pendamai dalam mediasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang bertikai setelah perceraian. Pola yang digunakan Majelis *Ṣulḥ* dalam mediasi merupakan salah satu alternatif yang efektif untuk mencari pendamaian dalam pertikaianan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah dapat membuktikan bahwa pola yang digunakan mampu untuk mengurangi kasus tertunda yang membelenggu Mahkamah Syari'ah selama ini.

Sejak kaedah *Ṣulḥ* diperkenalkan di Mahkamah Syari'ah Selangor, banyak kasus dapat diselesaikan di luar mahkamah. Pada tahun 2014 dari Januari hingga Desember 2014, dari 2534 kasus yang didaftarkan kepada pegawai *Ṣulḥ*, 1045 kasus yang dapat diselesaikan, 484 kasus dibawa ke hadapan hakim untuk persidangan, serta 758 kasus tidak dihadiri oleh pihak bertikai. Pada persentase kasus yang berhasil diselesaikan sebanyak 68% dan persentase kasus yang ditangani Majelis *Ṣulḥ* sebanyak 90%.<sup>9</sup> Ini menunjukkan keberhasilan pola yang digunakan *Ṣulḥ* dalam mediasi menimbulkan pertanyaan tentang pola yang diterapkan oleh Majelis *Ṣulḥ*. Kesuksesan penyelesaian kasus di luar pengadilan dapat mengurangi kasus yang perlu dibawa ke hadapan hakim untuk persidangan di Mahkamah Syari'ah dan seterusnya mengurangkan kasus yang meningkat dan tertunda.

Oleh karena itu, pola Majelis *Ṣulḥ* sangat penting untuk dijadikan saranan dan penerapan dalam masyarakat, karena *Ṣulḥ* dalam menyelesaikan sengketa akan menjadi penyelamat untuk masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Asas pelaksanaan pola Majelis *Ṣulḥ* ini ialah untuk menganjurkan penyelesaian

---

<sup>9</sup> Laporan Keseluruhan Statistik Kasus Sulh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor 2014

tuntutan secara perdamaian tanpa melalui proses persidangan di Mahkamah Syari'ah. Usaha untuk menganjurkan pihak-pihak yang bertikai terkait masalah kekeluargaan beralih kepada proses penyelesaian secara perdamaian ini sejalan dengan ajaran Islam yang amat menganjurkan umatnya memilih perdamaian.

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penelitian ini semakin penting apabila pola yang diterapkan Majelis *Ṣulḥ* dalam mediasi dapat menyelesaikan sengketa keluarga dan memberi dampak yang positif pada masyarakat, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara individu maupun institusi untuk memilih sulh sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam Memediasi Pertikaianan Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor”**

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pola yang diterapkan Majelis *Ṣulḥ* dalam menyelesaikan pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor
- 2) Bagaimana efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam menyelesaikan pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor

## **1.3. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui pola yang di terapkan Majelis *Ṣulḥ* dalam menyelesaikan mediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor
- 2) Untuk mengetahui efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam menyelesaikan mediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor

#### **1.4. Penjelasan Istilah.**

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami penelitian yang berkenaan “Efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam Mediasi Pertikaianan Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor”. Maka di sini penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Efektivitas

Majelis *Ṣulḥ*

Mediasi

Mahkamah Syari'ah

##### **1.4.1. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata ini memiliki empat makna, yaitu, (1) ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya, (2) manjur atau mujarab (tentang obat), (3) dapat membawa hasil, atau berhasil (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang atau peraturan).<sup>10</sup> Efektivitas di artikan keefektifan (sesuatu keberhasilan) sesuatu keberhasilan itu dapat dilihat daripada

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 284

hasil yang diperoleh seberapa jauh tercapainya suatu tujuan kuantitas dan kualitas yang telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.<sup>11</sup> Maksud istilah efektivitas dalam penelitian ini yaitu keefektifan, atau suatu keberhasilan penyelesaian kasus di Mahkamah Syariah Selangor. Kebijakan ini diberikan oleh Mahkamah Syariah kepada Majelis *Ṣulḥ* untuk membantu dalam mengurangi peningkatan kasus yang mengikat Mahkamah Syari'ah Selangor.

#### 1.4.2. Majelis *Ṣulḥ*

Majelis *Ṣulḥ* adalah merupakan salah satu prosedur untuk menyelesaikan masalah antara pasangan suami istri sebelum masalah tersebut dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dalam Mahkamah Syari'ah. Majelis *Ṣulḥ* juga merupakan suatu majelis musyawarah di antara suami dengan istri dan di ketuai oleh pegawai *Ṣulḥ* mengikut Manual Kerja *Ṣulḥ*. Secara umumnya *Ṣulḥ* merupakan penyelesaian suatu pertikaian antara pihak yang bertikai dalam sesuatu isu dengan cara persetujuan bersama antara mereka sendiri dan bukannya diputuskan oleh pihak ketiga.<sup>12</sup> Di dalam Majelis *Ṣulḥ* di anggotai oleh seorang pegawai *Ṣulḥ* yang berwenang sebagai mediator dalam memediasi pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan dan

---

<sup>11</sup> Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan Edisi Pertama*, Cet2, (Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992), hlm. 615

<sup>12</sup> [www.esyariah.gov.my](http://www.esyariah.gov.my), *Esyari'ah*, Diakses melalui situs: <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/BM+Sulh/Proses+Pengendalian+Majlis+Sulh+Di+Mahkamah+Syariah>, tanggal 21 April 2018

pendamaian.<sup>13</sup> Menurut penulis sendiri Majelis *Sulh* diwujudkan di bawah Mahkamah Syari'ah karena untuk membantu Mahkamah Syari'ah mempermudah proses pengurangan kasus yang terdaftar yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memberi jalan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bertikai melalui proses pendamaian di Majelis *Sulh*.

#### 1.4.3. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Menurut Syarizal Abbas makna mediasi menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Bermakna mediator harus berada pada posisi tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama.<sup>14</sup> Menurut Takdir Rahmadi menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>15</sup> Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, *Seksyen Sulh*, Diakses melalui situs: <http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp-2/bahagian-unit/bahagian-pengurusan-pendaftaran-ke-hakiman/seksyen-sulh?showall=&limitstart>, pada tanggal 15 Mei 2018

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam...* hlm.2.

<sup>15</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm.12.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 932.



Menurut penulis sendiri memediasi atau dikenali sebagai mediasi adalah suatu proses rundingan damai antara pihak yang bertikai yang diketuai oleh mediator dan mediator akan mencari jalan penyelesaian agar kedua belah pihak yang bertikai mendapat kesepakatan tanpa ada kerugian atau lebih dikenali sebagai *win-win solution*. Selain itu mediasi merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam mediasi pertikaian keluarga oleh Majlis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah di Malaysia.

#### 1.4.4. Mahkamah Syari'ah

Mahkamah Syari'ah adalah Pengadilan Agama yang berwenang dalam menegakkan hukum. Mahkamah Syari'ah ditubuhkan oleh Enakmen.<sup>17</sup> Pengurusan Agama Islam Negeri yang berfungsi untuk membicarakan kasus-kasus yang telah diperuntukan oleh Enakmen. Mahkamah Syari'ah lembaga peradilan yang memproses serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam untuk kesalahan sipil dan jinayah agama sesuai kewenangan yang diberikan untuknya.<sup>18</sup> Menurut penulis sendiri Mahkamah Syari'ah ditubuhkan untuk menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pengurusan Agama Islam untuk setiap negeri di Malaysia. Selain itu Mahkamah Syari'ah didirikan untuk menghakimi kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam yang tidak mematuhi peraturan berdasarkan Enakmen yang dibuat. Mahkamah Syari'ah juga berwenang dalam mengadili dan memutuskan setiap

---

<sup>17</sup> Enakmen bermaksud klasifikasi (cabang) dari Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

<sup>18</sup> Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu Ensiklopedia Bebas*, Diakses melalui situs: [https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia), pada tanggal 11 April 2018

permasalahan yang terjadi kepada orang Islam di Malaysia dalam pertikaianan kekeluargaan.

### **1.5. Kajian Pustaka.**

Dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menemukan bahan-bahan yang berkaitan skripsi penulis yang berkaitan dengan efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor

Pada skripsi Mustika Binti Muda,<sup>19</sup> membahas tentang Peran Majelis *Ṣulḥ* Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Mahkamah Syari'ah (Kajian Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Terengganu). Di dalam skripsi ini menjelaskan peran Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Terengganu dalam penyelesaian pihak yang bersengketa. Di dalam penulisan skripsi ini mustika lebih menekankan atau mengutamakan mengenai peran Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syariah Terengganu.

Menurut Siti Umu Kulsum, dalam skripsinya menjelaskan Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi (Analisa Pasca Pemberlakuan Perma No 1 Tahun 2008 Pengadilan Agama Jakarta Timur). Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana prosedur dan pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian dan mediasi merupakan alternatif penyelesaian untuk pihak yang bersengketa selain persidangan untuk mendapatkan kesepakatan. Mediasi

---

<sup>19</sup> Mustika Binti Muda, "*Peran Majelis Sulh Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga*" (Kajian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Terengganu), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013

adalah termasuk di antara negosiasi yang terbaik dalam menyelesaikan konflik. Mediasi merupakan alternatif yang menjanjikan konsep sama-sama untung ("*win-win solution*").<sup>20</sup>

Raihanah Azahari menyatakan di dalam bukunya. *Ṣulḥ* dalam kasus kekeluargaan Islam adalah salah satu konsep penyelesaian pendamaian pihak yang sengketa tanpa melibatkan lembaga pengadilan yang formal di Mahkamah Syari'ah. Pelaksanaan *Ṣulḥ* dapat memberi alternatif kepada pihak bertikai untuk menyelesaikan pertikaianan melalui Majelis *Ṣulḥ*. Penyelesaian dapat dilakukan kepada pihak yang bertikai untuk mencapai pendamaian.<sup>21</sup>

Penelitian ini berbeda dengan karya ilmiah yang digunakan dalam kajian pustaka di atas karena penelitian ini merupakan penelitian berkaitan pola yang diterapkan dan efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor.

#### **1.6. Metode Penelitian.**

Dalam penyusunan penulisan ini metode penelitian sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan sistematis karena metode yang dipakai mempengaruhi kualitas sesuatu penulisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berarti penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena

---

<sup>20</sup> Siti umu Kulsum, *Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi (Analisa Pasca Pemberlakuan Perma No 1 Tahun 2008 Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010

<sup>21</sup> Raihanah Azahari, *Sulh dalam Kasus Kekeluargaan Islam*, (Malaysia : Universitas Malaya, 2008)

sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.<sup>22</sup> Metode ini dimulai dengan pengumpulan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survei, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku dan analisis dokumenter.<sup>23</sup> Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

#### **1.6.1. Penelitian Kepustakaan.**

Metode ini dilakukan dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti: Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu yang memproses tentang *Al-Ṣulḥ* berkaitan macam-macam dan syarat *Ṣulḥ*,<sup>24</sup> dan di dalam buku Pengenalan dan Keberkesanan *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah ada menjelaskan mengenai konsep *Ṣulḥ* yang berkaitan dengan definisi dan sejarah pelaksanaan *Ṣulḥ*,<sup>25</sup> dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber referensi skripsi ini. Adapun jenis data dari karya ini adalah terdiri dari data primer, yaitu bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas, diperoleh langsung dari Al-Quran. Kemudian data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk mengetahui teori-teori atau pendapat yang menyangkut penelitian

---

<sup>22</sup> M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25

<sup>23</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm.16

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Jaminan, Pengalihan Utang, Gadai Paksaan, Kepemilikan)*, Jilid 6 (Kuala Lumpur : Darul Fikir, 2011), hlm. 235

<sup>25</sup> Adzidah Yaakob, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Asmidah Ahmad, Kamilah Wati Mohd, Mustafa Afifi Ab Halim, *Pengenalan dan Keberkesanan Sulh Di Mahkamah Syariah* (Negeri Sembilan : Universiti Sains Islam Malaysia, 2016), hlm.15

dan pembahasan dalam skripsi ini. Data sekunder juga digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dengan cara memperdalam buku-buku atau literatur yang relevan. Penulis juga menggunakan penjelasan dari kamus, jurnal dan situs yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

### **1.6.2. Penelitian Lapangan.**

Pada metode ini dilakukan riset di Mahkamah Syari'ah Selangor tentang efektivitas pola yang diterapkan Majelis *Şulh* dalam mediasi. Dalam mencari data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. Data diperoleh melalui:

#### **1.6.2.1 Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.<sup>26</sup> Penulis secara langsung pergi ke lapangan yaitu ke Jabatan Kehakiman Syari'ah Negeri Selangor untuk memperoleh informasi yang berkaitan.

Responden atau informasi yang dijadikan dalam penelitian ini pegawai *Şulh*, hakim dan pihak yang menghadiri Majelis *Şulh* di Mahkamah Syari'ah Negeri Selangor.

#### **1.6.2.2.Wawancara**

---

<sup>26</sup> H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006 ), hlm.104

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon, email dan lain-lain.<sup>27</sup>

. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada responden. Responden atau informasi yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah pegawai *Ṣulḥ* dan hakim yang berada dilokasi penelitian Jabatan Kehakiman Syari'ah Negeri Selangor.

#### 1.6.2.3.Data Dokumentasi

Data Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.<sup>28</sup> Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti mengetahui lebih mendalam kajian yang dilakukan.

Bahan dokumentasi dalam penelitian ini berupa undang-undang yang di daftarkan di Mahkamah Syari'ah dan surat edaran hakim, juga informasi Majelis *Ṣulḥ*, Mahkamah Syari'ah dan dari situs.

---

<sup>27</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet.10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.113

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet.1, (Indonesia: Kencana, 2011), hlm.141

#### 1.6.2.4. Angket (Kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. Instrumen berupa lembar daftar pertanyaan dapat berupa angket (kuesioner), *checklist* atau skala<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, dilakukan angket (kuesioner) kepada responden pihak bertikai yang menghadiri ke Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syariah Selangor.

#### 1.6.3. Metode Analisis Data.

Dalam metode analisis data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penulis menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang penulis peroleh dilapangan hasil wawancara.

Penulis juga mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, diolah untuk ditentukan data-data yang akurat, kemudian data-data tersebut dideskripsikan serta ditafsirkan untuk dijadikan kesimpulan. Selanjutnya dibuat kesimpulan yang menjawab permasalahan penulis yang di kemukakan sebelumnya. Melalui metode deskriptif, penulis dapat mengetahui bagaimana efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam mediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor.

---

<sup>29</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 49

#### **1.6.4. Teknik Analisis Data.**

Setelah data diperoleh oleh peneliti ditemukan dan dianalisis yang terkumpul dari berbagai metode riset kualitatif, kemudian dideskriptifkan sesuai dengan hasil yang ditemukan di lapangan, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat memberikan hasil serta kesimpulan tentang efektivitas dan pola Majelis *Ṣulḥ* dalam mediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syar'iah Selangor.

#### **1.6.5. Teknik Penulisan.**

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi dengan ketentuan yang telah ada, dan dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang ditetapkan pada Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014

#### **1.7. Sistematika Pembahasan.**

Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang komprehensif dan sistematis, pembahasan ini diuntukkan kepada empat bab. Setiap bab akan membahas sub-sub tertentu dan diantara sub-sub tertentu ada hubungannya antara satu dengan yang lain yang mana telah disusun dalam bab-bab sebagai berikut.

Bab Satu, penulis menjelaskan mengenai bab pendahuluan dimana dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi metode pengumpulan data, pendekatan dan analisis, dan terakhir berkaitan sistematika pembahasan.



Bab Dua, penulis menjelaskan dan menerangkan tentang perspektif umum tentang *Ṣulḥ*. Di dalam bab ini di per jelaskan lagi mengenai pengertian *Ṣulḥ*, asas praktek *Ṣulḥ*, sejarah pelaksanaan *Ṣulḥ*, peruntukan undang-undang *Ṣulḥ* dan akibat hukum dalam *Ṣulḥ*.

Bab Tiga, merupakan bab inti yang akan di bahas oleh penulis tentang efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam mediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor. Dalam bab ini juga diper jelaskan lagi mengenai gambaran umum Majelis *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor, dasar hukum dan kewenangan Majelis *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor, pola yang di terapkan Majelis *Ṣulḥ* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor, efektivitas pelaksanaan Majelis *Ṣulḥ* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor, tahap kepuasan pihak bertikai yang menghadiri Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Selangor, dan analisa penulis.

Bab Empat, merupakan bab yang terakhir di dalam penelitian ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap pembahasan skripsi tentang efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor dan di harapkan dapat memberi satu solusi untuk masalah yang dihadapi pada masa kini dan masa yang akan datang.

## **BAB DUA**

### **PERSPEKTIF UMUM TENTANG *ŞULĤ***

#### **2.1. Pengertian *Şulĥ*.**

*Şulĥ* dari sudut bahasa adalah perkataan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Şulĥu* dan merupakan kata nama (*al-ism*) yang berasal dari kata kerja (*al-f'īl*) secara menyeluruh berarti *al-taşāluĥ wa al-muşālahah*, yaitu merupakan perdamaian setelah terjadi perselisihan. Ar-Rāghib al-Afşihāni menyatakan bahwa *Şulĥ* dikhususkan untuk tujuan mengakhiri pertikaian di antara manusia.<sup>1</sup> Selain itu, ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ilmuwan mengenai *Şulĥ* ini. Secara umumnya definisi-definisi yang diberikan membawa pengertian yang sama.

Menurut 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Bassām dalam kitabnya menyatakan *Al-Şulĥu* secara etimologi adalah menentukan pertikaian, secara terminologi *Şulĥ* adalah melakukan perjanjian yang mengantarkan kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bertikai demi memutuskan pertikaian. Perdamaian salah satu upaya menarik kebaikan dan menolak keburukan demi menjaga kemaslahatan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perdamaian merupakan akad yang paling besar manfaatnya dalam umat Islam karena tidak ada pihak yang dirugikan malah kedua belah pihak mendapatkan hak masing-masing dalam proses perdamaian.

---

<sup>1</sup> Raihanah Azahari, *Sulh dalam Kasus Kekeluargaan Islam*, (Malaysia : Universitas Malaya, 2008), hlm 32

<sup>2</sup> 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al Bassām, *Syarah Būlūghul Marām, jilid4*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 529

Selain itu, Suzana Ghazali seorang perunding psikologi keluarga dan pengacara syar'i di Malaysia dalam penulisannya menyatakan *Şulh* membawa maksud putus pertengkaran atau bermakna kompromi. Merupakan upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara kedua belah pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham, ia juga dapat dikatakan sebagai konsep untuk mendapat kesepakatan melalui komunikasi.

Di dalam amalan perundangan sipil, *Şulh* dikenali sebagai *mediation*. Para ulama fiqih mendefinisikan *Şulh* sebagai satu ikatan perjanjian atau kontrak bersama untuk mencapai perdamaian antara dua belah pihak atau lebih, yang berselisih paham atau bertikai. Para ulama juga bersepakat menjadikan *Şulh* ini sebagai satu bentuk perundangan memandangkan banyak manfaatnya termasuklah menyelesaikan perselisihan dan pertikaian antara suami dan istri.<sup>3</sup>

Ada juga yang merujuk *Şulh* dalam maksud yang lain yaitu Mediasi. Mediasi boleh didefinisikan sebagai “proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai”. Ini bermakna mediasi merupakan ‘perundingan secara terpimpin’ (*assisted negotiation*) secara langsung kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suzana Ghazali, *Buatmu Wanita: Sebagai Anak Istri- Ketahui Hakmu*, (Selangor Darul Ehsan : Buku Prima Sdn.Bhd., 2009), hal. 296

<sup>4</sup> Siti Noraini dan Zulkifli Hasan, *Perlaksanaan Şulh dan Keberkesananny di Mahkamah Syariah Selangor*. Diakses melalui situs: <https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulhdi-mahkamah-syariah.pdf> pada tanggal 26 April 2018

Dari pengertian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan *Ṣulh* merupakan penyelesaian suatu pertikaian antara pihak yang bertikai dalam suatu isu dengan cara persetujuan bersama antara mereka sendiri, bukannya diputuskan pihak ketiga yang lain. *Ṣulh* sebagai akad penyelesaian, untuk mencapai akad penyelesaian tersebut berbagai macam cara boleh digunakan selama cara tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak. Ia juga merupakan akad yang menyelesaikan pertikaian yang akan terjadi. dan keridhaan dari kedua-dua belah pihak yang bersengketa amat penting dalam efektifitas sesuatu proses *Ṣulh* yang mana ia merujuk untuk mencari jalan penyelesaian antara kedua-dua pihak yang bersengketa.

## **2.2. Sejarah Pelaksanaan *Ṣulh*.**

Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam telah pun mengamalkan *Ṣulh* dalam menyelesaikan pertikaian yang timbul dalam kalangan mereka. Pada kebiasaannya, mereka akan melantik pengantara atau wasit sebagai orang tengah dalam menyelesaikan sesuatu pertikaian. Pengantara atau wasit ini biasanya terdiri daripada kalangan ketua kabilah.

### **2.2.1. Sumber Data.**

Sejarah zaman Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul pernah dilantik menjadi wasit dalam pertikaian yang melibatkan pembesar-pembesar Quraisy berhubungan tentang *Ḥajar Aswad*. Pada mulanya pembesar-pembesar Quraisy tidak mau bertoleransi dalam pertikaian mengenai siapa yang berhak meletakkan *Ḥajar Aswad* (batu hitam pada sisi Kaabah) ke tempat asalnya. Rasulullah SAW akhirnya

dilantik untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dan para pembesar bersetuju dengan kaedah penyelesaian yang dilakukan oleh Dalamnda SAW.<sup>5</sup>

Peristiwa ini dikenal baik oleh umat Islam di seluruh dunia. Peletakan *Hajar Aswad* memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi. Selain itu, kejadian ini dapat dipandang sebagai tahap akhir dari konflik yang berkepanjangan yang hampir mengakibatkan pertumpahan darah para pembesar Quraisy.<sup>6</sup>

Sebagaimana baginda juga pernah mengadakan perdamaian dengan penduduk Najran dengan syarat mereka membayar sejumlah harta. Dan juga mengadakan perdamaian dengan penduduk Bahrain dengan syarat mereka membayar sejumlah *jizyah* kepada baginda dan juga mengadakan perdamaian dengan ‘Ukaidir Daumah sehingga darahnya dilindungi dengan syarat membayar *jizyah*.<sup>7</sup>

Praktek *Ṣulḥ* ini telah diteruskan oleh para sahabat ketika pemerintahan Khulafa’ al-Rāsyidin. Pada zaman Saidina Abu Bakar telah melantik Saidina ‘Umar menjadi *Qaḍhi* di Madinah untuk membantunya dalam urusan kehakiman. Namun setelah setahun Saidina ‘Umar menjadi *Qaḍhi* tidak ada satu kasus yang diajukan kepada ‘Umar. Ini karena beliau telah menggariskan beberapa prinsip asas dalam pentadbiran kehakiman yang terkandung dalam *Risālah al-Qadā’*. Salah satu prinsip

---

<sup>5</sup> Adzidah Yaakob, *Pengenalan dan Keberkesanan...*, hlm 11

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...*, hlm 166

<sup>7</sup> Abū Bakar Jābir Al-Jaza’iri, *Minḥaj al-Muslim Panduan Hidup Muslim Sempurna*, cet 1 (Malaysia: Karangkraf, 2015), hlm. 855

yang dinyatakan dalam risalah tersebut adalah penegasan Saidina ‘Umar tentang keharusan mengadakan *Ṣulḥ*<sup>8</sup>

Pada zaman Banī Umayyah dan Banī Abbāsiyyah perubahan banyak terjadi dalam sistem kehakiman menyebabkan peranan *Ṣulḥ* tidak lagi diutamakan karena pada masa itu sistem kehakiman Islam lebih berkembang dan akhirnya pada zaman Khālifah ‘Uṣmaniyyah terjadi kejatuhan pemerintahan, penjajah mulai menguasai sebagian besar dunia Islam. Kedudukan negara-negara Islam menjadi lemah. Pelaksanaan undang-undang Islam mulai diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Konvensional Barat. Akhirnya telah menggantikan peranan *Ṣulḥ* dalam menyelesaikan pertikaian.<sup>9</sup>

Dapat dijelaskan bahwa praktek *Ṣulḥ* dalam menyelesaikan pertikaian telah lama dilaksanakan dalam masyarakat pra Islam dan kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan kerajaan Islam seterusnya. Walaupun tidak terdapat satu kerangka undang-undang yang jelas berhubungan masa pelaksanaannya, tetapi telah dilaksanakan dalam masyarakat karena kecenderungan mereka untuk merujuk pertelingkahan yang timbul kepada pihak-pihak yang beribawa dalam masyarakat seperti ketua kabilah, pemimpin setempat. Prakteknya bukan hanya terbatas kepada kasus kekeluargaan tetapi diperluaskan kepada pertikaian komersial dan politik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Adzidah Yaakob, *Pengenalan dan Keberkesanan...*, hlm. 14

<sup>9</sup> Raihanah Azahari, *Sulh dalam Kasus...*, hlm 9

<sup>10</sup> Adzidah Yaakob, *Pengenalan dan Keberkesanan...*, hlm 15

Masa pelaksanaan *Ṣulḥ* diberi keutamaan dalam menyelesaikan, tanpa mengira yang telah dibawa ke mahkamah atau tidak. Rasulullah SAW selalu mengutamakan penyelesaian secara damai. Oleh sebab itu masa pelaksanaan *Ṣulḥ* boleh dilaksanakan kapan saja, baik sebelum atau sesudah pertikaian dirujuk ke mahkamah. Dalam konteks semasa, kesesuaian *Ṣulḥ* untuk menangani kasus-kasus pertikaian keluarga dilihat baik terutamanya apabila pola persidangan mahkamah menimbulkan masalah kepada pihak yang terlibat dalam pertikaian dan seterusnya memberi dampak terhadap institusi kekeluargaan.<sup>11</sup>

### **2.3. Asas Praktek *Ṣulḥ*.**

Asas praktek *Ṣulḥ* terdapat dari dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Hadist yang telah ditetapkan dan menganjurkan melaksanakan *Ṣulḥ* dalam berkaitan pertikaian, sengketa atau konflik. Di antara dalil-dalil pensyariatan yang dirujuk berkaitan dengan *Ṣulḥ* sebagai berikut:

#### **2.3.1. Dalil Al-Quran Al-Karim.**

*Ṣulḥ* merupakan kaedah atau jalur dalam penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam syariat Islam. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang berkaitan *Ṣulḥ* atau perdamaian.

---

<sup>11</sup> Raihanah Azahari, *Sulh dalam Kasus...*, hlm 48

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>12</sup>

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir bahwa suami menjauhkan diri (*nusyuz*) dari dia atau menalakinya, maka tidak ada keberatan dalam mereka berdua mengadakan perdamaian yang sesungguhnya-sungguhnya. Perdamaian itu lebih baik (dalam mereka), sedangkan manusia ditabiatnya kikir. dan jika kamu terjadi baik (ihsan) dan terjadi takwa, maka sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs: Al-Nisa: 4: 128).

Ayat ini menjelaskan bahwa perdamaian antara suami istri yang bersengketa hukumnya dibolehkan. Seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich menyatakan meskipun ayat ini konteksnya berkaitan dengan perdamaian dalam urusan suami istri, namun hukum perdamaianya sendiri bisa diperluas untuk bidang muamalah.<sup>13</sup>

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisa ayat 114:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا<sup>14</sup> ﴾

<sup>12</sup> Muḥammad Ḥasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Mājid an-Nūr Jilid 1* (surat 1-4). (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 962-963

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 482

<sup>14</sup> Muḥammad Ḥasbī aṣh-Ṣhiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, hlm. 952



Artinya: Tak ada kebajikan pada bisikan mereka, kecuali bisikan orang-orang yang menyuruh memberi sedekah dan berbuat makruf atau mendamaikan manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mengharap keridhaan Allah, kelak akan Kami berikan pahala yang besar kepadanya (Qs: Al-Nisa: 4: 114).

Ayat ini menjelaskan bahwa memberikan sedekah, menyuruh makruf dan membuat perdamaian secara tersembunyi (tidak dipertunjukkan kepada umum). Seperti yang dikutip Muhammad Hasbi dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid menyatakan memberikan sedekah kepada seseorang mungkin menyakiti dan merendahkan harga dirinya. Menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran lebih berhasil apabila dilakukan tidak secara terang-terangan. Demikian pula mendamaikan manusia secara diam-diam dan tidak di muka umum, lebih memungkinkan tujuan yang ingin dicapainya bisa terwujud.<sup>15</sup>

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا <sup>ط</sup> فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ <sup>ج</sup> فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ <sup>16</sup>

Artinya: Dan kalau ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara kedua-duanya. Jika salah satu daripada kedua-duanya menzalimi golongan yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu sudah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya

<sup>15</sup> Muhammad Ḥasbī aṣh-Ṣhiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, hlm. 952hlm. 953

<sup>16</sup> Hussamuddin Yaacub, *Al-Quran Perkata Kaedah Berwarna*, (Malaysia: Karya Bestari, 2016), hlm 515

dengan adil, dan terjadi adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang terjadi adil. (Qs: Al-Hujurat : 49 : 9).

Ayat ini sebagai dasar dalam pihak yang berselisih untuk menjadikan *Ṣulḥ* sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Seperti yang dinyatakan Syarizal Abbas dalam penjelasannya bahwa upaya perdamaian merupakan jalan terbaik untuk kamu menyelesaikan pertikaian. Sekaligus mendorong para pihak untuk menggunakan *Ṣulḥ* dalam mengakhiri pertikaian untuk mencapai perdamaian.<sup>17</sup>

### 2.3.2. Dalil Hadits.

Rasulullah SAW amat mendorong umatnya untuk mencari jalan perdamaian dan menghindari pertikaian sesama sendiri. Dapat ditemukan dalam sebuah hadits berkaitan *Ṣulḥ* diriwayatkan oleh ‘Amru bin ‘Auf Al Muzani. Rasulullah SAW bersabda:

عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذي)<sup>18</sup>

Artinya : Diriwayatkan oleh ‘Amru bin ‘Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : perdamaian diantara umat Islam diperbolehkan kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan umat Islam boleh memenuhi syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

<sup>17</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...*, hlm. 206

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku no 2, Cet 2.(Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 110

mengharamkan sesuatu yang halal atau meghalalkan sesuatu yang haram”  
Hadits ini adalah hasan shahih (Hadits riwayat At-Tirmizi)

Hadits ini adalah dalil tentang kebolehan perdamaian dalam segala sesuatu, jika tidak bertentangan dengan syariat. Al-Syawkāni berkata, “Perdamaian itu boleh dilakukan terhadap sesuatu yang sudah diketahui dan tidak diketahui. Hadits ini menunjukkan keharusan memenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat dalam semua transaksi.<sup>19</sup>

Selain itu Ibnu Hajar, seperti yang dikutip oleh Raihanah Azahari menjelaskan dalam *al-Fath*, “Perdamaian itu ada bermacam-macam, yaitu: perdamaian seorang Islam dengan orang kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang memberontak dengan kelompok yang adil, perdamaian antara dua pihak yang saling membenci, perdamaian dalam hal kecelakaan seperti membebaskan biaya, perdamaian demi menyelesaikan pertikaian dan lain-lain.<sup>20</sup> Oleh demikian bahwa setiap penyelesaian haruslah dalam kerangka yang berlandaskan hukum syarak dan segala jenis penyelesaian *Ṣulḥ* yang menyalahi hukum syarak adalah tidak sah.

### 2.3.3. Dasar dari Ijma'.

Ulama Islam sepanjang zaman sependapat bahwa akad perundingan haruslah mengikuti dengan hukum syarak. Ada dalil yang menunjukkan adanya kesepakatan para ulama di kalangan sahabat mengenai amalan *Ṣulḥ*. Saidina ‘Umar al-Khaṭṭab r.a.

<sup>19</sup> Faiṣal bin ‘Abdul ‘Aziz ‘Alu Mubārak , *Būlūghul marām...*, hlm. 639

<sup>20</sup> ‘Abdul Qādir Syaibah al-ḥamad,, *Fiqhul Islam Syarah Būlūghul Marām*, Jilid 5. (Jakarta: Dārul Haq, 2007), hlm. 310-311

berkata : “Suruhlah mereka yang bertelingkah supaya duduk semeja agar mereka berunding. Jika hakim memutuskan, mereka akan saling membenci“. Kata-kata Saidina ‘Umar r.a. ini diucapkan di hadapan para sahabat dan tidak sesiapaupun yang membantahnya. Dengan ini mereka mencapai kata sepakat bahwa rundingan (*Ṣulḥ*) dibenarkan oleh syarak”. *Ṣulḥ* juga dibenarkan sekiranya perkara itu melibatkan hak manusia dan tidak dibenarkan di dalam kasus yang melibatkan hak Allah seperti *ḥudud*.<sup>21</sup>

Dari penjelasan hadits oleh Saidina ‘Umar al-Khaṭṭab r.a ini menunjukkan bahwa amalan *Ṣulḥ* telah disepakati sebagai kaedah yang sesuai untuk penyelesaian terhadap pertikaian yang terjadi pada manusia dan dijelaskan juga bahwa keputusan di mahkamah lebih meninggalkan dampak yang buruk kepada manusia.

#### **2.4. *Ṣulḥ* di Dalam Perundangan Islam di Malaysia.**

Jika diteliti undang-undang syari’ah yang digariskan di Malaysia, Pelaksanaan *Ṣulḥ* berdasarkan undang-undang syari’ah setiap provinsi masing-masing yang mana pelaksanaannya dalam mencari solusi perdamaian dan dikenal sebagai Majelis *Ṣulḥ*. Setiap provinsi mempunyai peraturan berbeda. Namun demikian terdapat peruntukan mengenai *Ṣulḥ* dan meletakkan bahwa *Ṣulḥ* itu dalam suatu bentuk proses berdasarkan prosedur tertentu yang diharuskan. Maka dapat disimpulkan bahwa *Ṣulḥ* merupakan keputusan atau hasil dari suatu perdamaian atau kesepakatan oleh pihak-

---

<sup>21</sup> Norita Kamaruddin, *Konsep Sulh Menurut Perspektif Islam Dan Aplikasinya Dalam Mahkamah Syariah Di Malaysia, (IRSYAD no 1002)*, (Malaysia: Kuis, 2016), hlm. 31

pihak yang bertikai dan bersengketa. Majelis *Ṣulḥ* merupakan suatu proses perundingan dipimpin yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Syarak' dan undang-undang.<sup>22</sup>

Pelaksanaan *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah secara tidak resmi telah di pratekkan oleh pendaftar dan penolong pendaftar Mahkamah Syari'ah dan para Pengacara Syar'i malah adakalanya datang dari perintah daripada Hakim Syar'i. Perundingan dibuat mengikut kehendak klien dan mengikut kesempatan masa sebelum atau semasa prosedur persidangan. Draf pertama berkaitan *Ṣulḥ* telah diwujudkan oleh Lembaga Teknis Undang-Undang Syarak dan Sivil Kebangsaan yang dinamakan Kaedah-Kaedah (Prosedur Mal) (*Ṣulḥ*) Wilayah-Wilayah Persekutuan 1998.<sup>23</sup>

Kemudian dirujuk sebagai "Akta 585" Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (*Ṣulḥ*) Wilayah-Wilayah Persekutuan 2004 dan Arahan-arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia (*JKSM*). Berikut ini telah dirangka sebagai panduan dalam pengendalian prosedur *Ṣulḥ* oleh Jawatankuasa Kaedah-kaedah Mahkamah Syari'ah yang terdiri daripada Ketua Hakim Syar'i (bertindak sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kaedah-kaedah), seorang wakil Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, seorang wakil daripada Jabatan Pengacara Negara, seorang wakil Pengacara Syar'i dan

---

<sup>22</sup> Seksyen 99 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

<sup>23</sup> Hammad Bin Mohamad Dahalan Dan Mohamad Azhan Bin Yahya, *Kedudukan Pegawai Ṣulḥ Di Mahkamah Syari'ah, (IRSYAD no 1090)*, (Malaysia: Kuis, 2016), hlm. 4083

bidang kuasa Jawatankuasa ini sebagai merangka kaedah *Ṣulh* yang diperincikan dalam seksyen 247(1)(c) Akta 585.<sup>24</sup>

#### **2.4.1 Konsep *Ṣulh* Dalam Perundangan Islam.**

Islam mengharuskan umatnya menyelesaikan pertikaian kekeluargaan secara perundingan dan perdamaian. Terdapat beberapa kaedah penyelesaian pertikaian secara perundingan yang bisa digunakan dalam Islam. Misalnya kaedah hakam atau arbitrase, mediasi, kombinasi mediasi dan arbitrase, dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya semua kaedah yang dinyatakan bertujuan menyelesaikan sesuatu pertikaian secara kesepakatan bersama namun terdapat beberapa perbedaan dalam proses pelaksanaan dan jenis kasus yang diselesaikan.<sup>25</sup>

Persidangan antara tempat terbaik dalam menyelesaikan pertikaian khususnya dalam masalah rumah tangga. Namun, persidangan boleh menjadi langkah terakhir dalam menegakkan keadilan. Dengan itu, pendekatan awal yang digunakan adalah perundingan antara pihak yang terlibat dalam pertikaian. Umumnya, kaedah rundingan atau permuafakatan secara damai bukanlah perkara baru dalam sistem pengadilan Islam. Perundingan damai telah dipraktikkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul dan terus dipraktikkan oleh generasi selanjutnya.

Proses persidangan melalui mahkamah bukanlah mudah. Ia melibatkan proses yang memerlukan masa yang panjang. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat

---

<sup>24</sup> Adzidah Yaakob , *Pengenalan dan Keberkesanan...*, hlm. 33-34

<sup>25</sup> *Ibid* hlm. 15

dalam pertikaian terpaksa bersikap defensif dan ofensif untuk mempertahankan hak masing-masing. Dalam keadaan ini, meskipun mahkamah berfungsi sebagai institusi yang membuat keputusan terhadap kasus-kasus yang bersengketa, namun tidak semestinya dicapai melalui pengadilan di depan hakim. Dengan kata lain, menghadiri persidangan mahkamah merupakan salah satu daripada mekanisme yang ada untuk menyelesaikan pertikaian. Selain itu, penyelesaian juga boleh dicapai berdasarkan kesepakatan bersama melalui *Ṣulḥ* tanpa melalui proses persidangan<sup>26</sup>

#### **2.4.2 Asas Objektif *Ṣulḥ* di Malaysia.**

Pada dasarnya masyarakat Islam di Malaysia menggunakan Mahkamah Syari'ah sebagai rujukan terakhir dalam menyelesaikan kasus-kasus kekeluargaan. Persepsi masyarakat Islam di Malaysia bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga perlu diselesaikan di Mahkamah Syari'ah dan perlu untuk melantik pegacara dalam penyelesaian sesuatu pertikaian. Hal ini adalah kurang tepat dengan prinsip keadilan karena Islam itu indah dan berlandaskan prinsip keadilan. Tidak semua permasalahan atau kasus yang didaftarkan perlu untuk membiayai pegacara. Pihak bertikai boleh mendapatkan pendapat di meja pendaftar untuk mendapat pandangan dan sebagainya. Seperti pada umumnya, untuk membiayai seorang pegacara memerlukan biaya yang tinggi dan tidak semua mampu untuk menyewa pengacara.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Norita Kamaruddin, *Konsep Sulh...*, hlm. 26-27

<sup>27</sup> Hammad Mohamad Dahalan, *Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan Dan Keberkesanan Oleh Pegawai Sulh, (IRMIC no 81)*, (Malaysia: Kuis, 2014), hlm. 565

Rumusan yang boleh diberikan mengenai definisi *Ṣulḥ* yang dipraktikkan di Mahkamah Syari'ah dari sudut undang-undang dan prakteknya adalah *Ṣulḥ* merupakan suatu kaedah penyelesaian secara damai dan ridha meridhai di mana pihak-pihak bertikai terhadap sesuatu kasus klaim atau permohonan menghadiri satu proses diskusi di dalam suatu majelis perundingan yang dipimpin secara resmi, yang diatur oleh Pegawai *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah. Penyelesaian yang dicapai oleh kedua-dua belah pihak akan dicatatkan di depan hakim dan dijadikan suatu perintah di mana keputusan bersifat mengikat.

#### 2.4.3. Syarat-syarat Dalam *Ṣulḥ*.

Syarat-syarat *Ṣulḥ* yang berkaitan adalah kedua belah pihak yang berdamai (*al-Muṣāliḥ*), ada yang berkaitan dengan pergantian sesuatu yang disengketakan (*al-Muṣālah'laihi*) dan ada yang berkaitan dengan sesuatu yang disengketakan (*al-Muṣālah'anhu*).<sup>28</sup>

##### (1) Pihak-pihak yang berdamai

- (a) Orang yang layak dan sah mendermakan hartanya. Jika ia dibuat oleh orang yang tidak layak seperti orang gila atau kanak-kanak atau penjaga anak yatim atau nazir harta wakaf, maka *Ṣulḥ*nya tidak sah karena ia merupakan derma, sedangkan mereka tidak memilikinya.
- (b) *Muṣāliḥ* yang mewakili anak dibawah umur harus orang yang memiliki hak *taṣarruf* dalam hartanya, seperti ayah, kakek dan

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh...*, hlm. 242-243



pemegang wasiat. Hal tersebut dikarenakan *Ṣulḥ* merupakan suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan harta sehingga diperlukan kewenangan untuk melakukannya.

(2) Sesuatu pengantian yang dijadikan *Ṣulḥ*

- (a) Ia merupakan harta yang boleh dinilai dan dapat dibuat penyerahan atau sesuatu yang berharga. Tidak sah perdamaian dengan imbalan darah, bangkai, khamar dan barang lain yang tidak bernilai.
- (b) Harta yang menjadi pengganti *Ṣulḥ* harus diketahui wujud dan bukan tidak jelas. Hal ini karena ketidakjelasan barang penggantian dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

(3) Hak yang dipertikaikan.

- (a) Harus berupa hak manusia bukan hak Allah, baik dalam bentuk benda, utang maupun hak yang bukan benda dan utang, seperti hukuman *qīṣāṣ* dan *ta'zīr*. Apabila hak yang menjadi objek *Ṣulḥ* adalah hak Allah, seperti larangan zina, *qazaf*, dan *sirqaḥ* maka perdamaian itu tidak sah .
- (b) *Al-Muṣālah'anhu* harus merupakan hak tetap dalam *al-Muṣālih* yang berkaitan dengan objek *Ṣulḥ*. Apabila hak tersebut belum merupakan hak yang tetap dalamnya maka perdamaian tersebut tidak sah.<sup>29</sup>

Kesempurnaan syarat tersebut, menunjukkan bahwa *Ṣulḥ* telah disepakati kedua belah pihak ia bersifat mengikat dan tidak boleh diubah tanpa persetujuan dan

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 244-245

tidak boleh didengar dakwaan yang mengklaim buat kali kedua. Namun demikian penyelesaian yang dibuat di Majelis *Ṣulḥ* boleh di bawa ke Mahkamah Syari'ah jika terdapat ketidaktulusan, penipuan, dan sebagainya yang mengakibatkan ketidakadilan kepada sesuatu pihak.

## 2.5. Akibat-akibat Hukum *Ṣulḥ*.

Akad perdamaian menimbulkan beberapa konsekuensi hukum sebagai berikut.

- (1) Putusnya gugatan dan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa menurut hukum. Dengan demikian, tuntutan kedua belah pihak setelah itu tidak terjadi lagi.
- (2) Berkaitan dengan hak *syuf'ah* dalam syafi'. Apabila yang dituntut sebuah rumah, sedangkan penggantinya bukan rumah, melainkan uang atau lainnya, maka hak *syuf'ah* masih tetap dalam syafi', apabila jenis perdamaian iqrar atau pengakuan dari tergugat. Hal tersebut dikarenakan dalam kasus *Ṣulḥ* mengandung arti jual beli. Apabila jenis *Ṣulḥ*nya ingkar dari tergugat, maka tidak ada hak *syuf'ah* karena di sini tidak terkandung arti jual beli apabila dinisbahkan kepada tergugat.
- (3) Adanya hak pengembalian barang karena cacat (aib).
- (4) Hak pengembalian barang karena *khiyāru'yah* yaitu hak memilih antara melanjutkan dan tidak dengan melihat barang yang ada.
- (5) *Al-Muṣālih* tidak boleh melakukan *taṣarruf* terhadap penggantian *Ṣulḥ* sebelum penggantian (*badal*) *Ṣulḥ* tersebut diterima ditangannya, apabila

bendanya benda bergerak (*manqūl*). Dan apabila bendanya tetap (*‘aqar*), menurut Imam Abu Ḥanifah dan Abu Yusuf, *taṣarruf* boleh dilakukan. Sedangkan menurut Muhammad bin Ḥasan, *taṣarruf* tidak boleh dilakukan sebelum barangnya diterima di tangan *muṣālih*.

- (6) Orang yang menjadi wakil dalam *Ṣulḥ* terikat untuk menerima pengganti (*badal*) *Ṣulḥ* dari tergugat, apabila *Ṣulḥ*nya bersifat *mu’awadah*. Apabila *Ṣulḥ*nya bersifat penyerahan barang, seperti tagihan satu juta rupiah, tetapi berdamai untuk membayar lima ratus ribu rupiah maka dalam hal ini wakil terikat dengan pengganti *Ṣulḥ* apabila ia memberikan jaminan untuk sisanya. Akan tetapi, apabila ia tidak menjaminnya maka ia tidak terikat karena dalam kasus ini ia sebagai utusan.<sup>30</sup>

### 2.5.1 Hal-hal Yang Membatalkan Akad *Ṣulḥ*.

Perdamaian dapat dibatalkan karena ada beberapa hal yang menghalangi akad *Ṣulḥ*, bahwa pada dasarnya perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan ia telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Pengadilan Tingkat terakhir, dengan perkataan lain tidak dapat diajukan gugatan terhadap perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian perdamaian tersebut masih ada kemungkinan untuk dibatalkan.<sup>31</sup> Adapun hal-hal yang membatalkan akad *Ṣulḥ*, adalah sebagai berikut.

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 491-492

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 32

- (1) *Al-‘Iqālah*<sup>32</sup> dalam selain *Sulh* atas *qīṣāṣ*. Apabila salah satu pihak mengusulkan pembatalan akad dan diterima (disepakati) oleh pihak lainnya maka akad perdamaian menjadi *fasakh* (batal), karena di sini terkandung makna tukar-menukar barang dengan barang, yang memungkinkan untuk di *fasakh* seperti hal jual beli.
- (2) Pengembalian barang karena *khiyāru‘aib* (cacat) atau atas dasar *khiyāru‘yah*. Hal ini karena pengembalian barang berarti membatalkan akad.
- (3) Meninggalnya salah satu pihak dalam *Ṣulḥ* atas manfaat sebelum waktunya habis. Hal tersebut dikarenakan *Ṣulḥ* atas manfaat mengandung arti atau memiliki kedudukan akad *‘ijārah*. Sedangkan akad *‘ijārah* menjadi batal karena salah satu pihak yang melakukan akad *‘ijārah* meninggal dunia.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Salah satu pihak yang melakukan akad meminta dan menginginkan untuk membatalkan akad, lalu pihak yang lain menrima dan meluluskan keinginannya tersebut. Atau dengan kata lain, pembatalan akad atas keinginan salah satu pihak dan distujui oleh pihak yang lain.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 493

## **BAB TIGA**

### **EFEKTIVITAS MAJELIS *ŞULĤ* DALAM MEMEDIASI PERTIKAIAN KELUARGA DI MAHKAMAH SYARI'AH**

#### **3.1. Gambaran Umum Majelis *Şulĥ* Mahkamah Syari'ah Selangor.**

Pada tahun 1900, Majelis Musyawarah Provinsi telah memutuskan Undang-Undang Pendaftaran Nikah Kawin dan Cerai Orang-Orang Islam 1900 (*Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900*) yaitu undang-undang berhubungan dengan nikah kawin dan cerai orang-orang Islam di Provinsi Selangor.

Pada tahun 1900 juga, jabatan *qaḍhi* mula diperluas ke kabupaten-kabupaten dalam provinsi Selangor dan pada tahun 1922 tiap-tiap kabupaten ada *qaḍhinya* masing-masing yaitu di kabupaten Klang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan Rawang.

Pada tahun 1948 struktur Jabatan Agama Islam Selangor (*JAIS*) telah dibentuk, dengan itu usaha merencanakan dan menyusun undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 dan mula diberlakukan pada 5 Desember tahun 1952.

Dengan adanya undang-undang ini maka undang-undang terdahulu tidak berlaku lagi. Sehingga hari ini undang-undang ini telah mengalami pergantian sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1969, 1960, 1961, 1962, 1966, 1972 dan pada 1979.

Pergantian ini dibuat berkaitan dengan pembaruan pengurusan awal Islam di provinsi Selangor.

Pada tahun 1984 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor No. 4 tahun 1984 telah diterbitkan dan diberlaku pada 23 Januari 1989 di seluruh provinsi Selangor. Pelaksanaan Undang-undang ini telah menggantikan bagian ke 6 dan 7 seksyen 155, 156, 158, 160 dan 178 perenggan (n) Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952.

Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. 2 tahun 1989 telah diterbitkan. Berdasarkan enakmen ini, Mahkamah Syari'ah Selangor didirikan secara resmi dan berpisah dari struktur Jabatan Agama Islam Selangor (*JAIS*). Pada tahun 1991, Enakmen Qanun Prosedur Jinayah Syari'ah Selangor No. 6 tahun 1991 dan Enakmen Qanun Prosedur Mal Syari'ah Selangor No. 7 tahun 1991 telah diterbitkan dan mula berlaku pada 1 September 1991. Mulai tanggal itu Mahkamah Syari'ah Selangor telah berpisah secara resminya dari *JAIS*.

Pada tahun 2003 nama Mahkamah Syari'ah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Syari'ah Negeri Selangor (*JAKESS*) selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Mahkamah Syari'ah di Provinsi Selangor adalah di bawah pasal 55(1), 55(2), 55(3) dan 55(4) dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Provinsi Selangor) 2003.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [www.jakess.gov.my](http://jakess.gov.my/info-jabatan/maklumat-korporat/latar-belakang/), Diakses melalui situs <http://jakess.gov.my/info-jabatan/maklumat-korporat/latar-belakang/>. Pada tanggal 1 Oktober 2018

Pusat pengurusan Mahkamah Syari'ah Provinsi Selangor beroperasi di Tingkat 5 & 6, dikenali sebagai kantor Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Mulai tanggal 2 Oktober tahun 2003, pengurusan pentadbiran Mahkamah Syari'ah Provinsi Selangor telah ditukar namanya dan dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor (*JAKESS*). Sejak tanggal 18 Julai 2011, *JAKESS* telah berpindah dan memulai operasinya ke kantor yang baru di kantor Mahkamah Syari'ah Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor.

Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor (*JAKESS*) bertanggungjawab menguruskan perjalanan kasus mal (keluarga), kasus jinayah (pidana), kasus rayuan (banding) serta pembagian *farā'id* di semua peringkat mahkamah. *JAKESS* mempunyai 3 Struktur Organisasi Mahkamah Syari'ah yaitu Mahkamah Rayuan (banding) Syari'ah Selangor dan Mahkamah Tinggi Syari'ah Selangor yang beroperasi di kantor Mahkamah Syari'ah Sultan Idris Shah, Shah Alam. Manakala Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor teletak di 10 kabupaten di provinsi Selangor.<sup>2</sup>

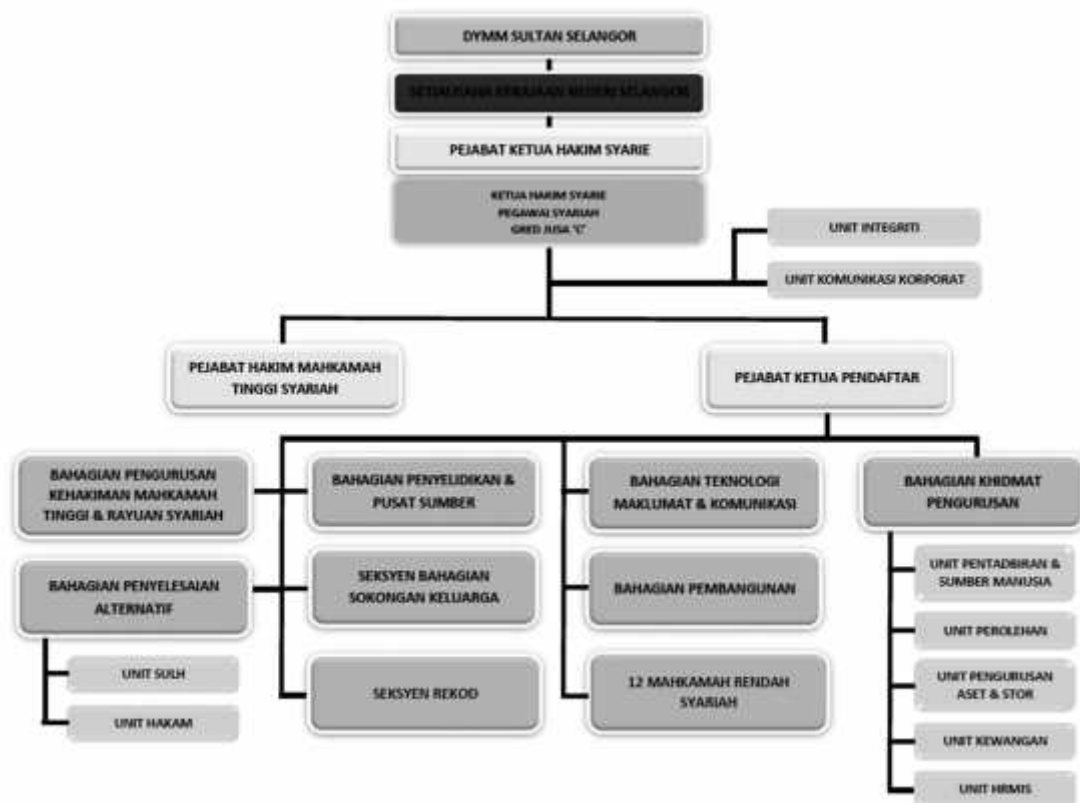
Selain itu, Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor mempunyai visi dan misi untuk memastikan pelaksanaan yang dijalankan mencapai tujuan. Visi Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor pula adalah: "*JAKESS* sebagai Institusi Kehakiman Syari'ah yang terunggul di Malaysia pada tahun 2020 yang berteraskan kepada keadilan Islam". Misi Jabatan Kehakiman Syari'ah Provinsi Selangor adalah

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 14 September 2018

“Melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara profesional, berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan Undang-Undang Islam yang seragam di Selangor”<sup>3</sup>

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan aktivitas kerja, maka dibentuklah struktur organisasi di bawah naungan Mahkamah Syari’ah Provinsi Selangor. Struktur ini didirikan untuk memudahkan kerja di Mahkamah Syari’ah berjalan dengan sistematika, tulus dan tiada kelewatan dalam pelaksanaan kerja. sebagaimana berikut:



Sumber dari: Jabatan Kehakiman Syari’ah Selangor

<sup>3</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, *Pelan Strategik 2015-2020* ( Vol. 2), (Malaysia: JAKES, 2015), hlm. 13



Pada awalnya pelaksanaan *Ṣulḥ* di Selangor dijalankan secara tidak resmi di hadapan petugas pendaftaran di mahkamah atas inisiatif hakim apabila hakim mendapati pihak-pihak yang bersengketa ada jalan untuk penyelesaian secara *Ṣulḥ*. Keadaan ini perlu karena hakim terbeban dengan jumlah kasus yang banyak. Penyelesaian secara *Ṣulḥ* dapat membantu hakim mengurangi kasus-kasus yang tertunda.

Bermula tanggal 1 Mei 2002, Mahkamah Syari'ah Selangor telah melaksanakan secara resmi proses *Ṣulḥ* sebagaimana yang terkandung di dalam Kaedah-Kaedah Mal *Ṣulḥ* Selangor tahun 2001 berdasarkan peruntukan Seksyen 87 dan 88 Enakmen Qanun Prosedur Mal Syari'ah Selangor 1991, tetapi telah diberi 'gaya baru' bagi menjadikan peranan Mahkamah Syari'ah Selangor lebih efektif di samping membantu pihak-pihak yang bertikai di mahkamah menyelesaikan pertikaian mereka tanpa perlu melalui persidangan. Setelah kaedah *Ṣulḥ* diwartakan, kerajaan negeri telah meluluskan perlantikan Pegawai Syari'ah Gred L3 (sekarang LS41) bertaraf kontrak sebanyak 11 orang untuk bertugas sebagai pegawai *Ṣulḥ* di 10 kabupaten Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor dan seorang di Mahkamah Tinggi Syari'ah Shah Alam.<sup>4</sup>

Kelayakan minimum pegawai *Ṣulḥ* adalah Ijazah Sarjana Muda Syariah (S1) dan Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam atau Diploma yang setaraf dengannya (D3), kelayakan ini adalah sama dengan kelayakan seseorang Hakim

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

Mahkamah Rendah Syari'ah. Semua pegawai ini telah dilantik dan mula bertugas sejak tanggal 14 April 2002. Pegawai *Şulh* Selangor terdiri dari 7 orang pegawai lelaki dan 3 orang perempuan. Sehingga sampai saat ini Skim Perjawatan Pegawai *Şulh* telah berkembang menjadi 13 orang pegawai yang terdiri dari 8 orang lelaki dan 5 orang perempuan yaitu 3 orang pegawai bertugas di Mahkamah Tinggi dan selainnya di Mahkamah Rendah Syari'ah di kabupaten-kabupaten provinsi Selangor. Antara anggota pegawai *Şulh* yang bertugas di Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor adalah Mohd Suhail bin Mohd Najid dan Mohd Syafiq bin Ibrahim.<sup>5</sup>

### **3.2. Dasar Hukum dan Kewenangan Majelis *Şulh* di Mahkamah Syari'ah Selangor.**

Ibrahim Lembut Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia. Dalam pernyataan yang dikeluarkan arahan amalan No 1 tahun 2010. Kasus-kasus *Şulh* yang boleh diselesaikan perlu dirujuk ke Majelis *Şulh* pada peringkat pendaftaran di Mahkamah Syari'ah. Antara kasus yang berkaitan dengan *Şulh* adalah gugatan karena melanggar janji dalam pertunangan, perkawinan dan juga gugatan-gugatan konsekuensi dari suatu perceraian contohnya *mut'ah*, nafkah '*iddah*, harta bersama, nafkah anak. Majelis *Şulh* mempunyai hak kewenangan untuk mencari jalan solusi dalam menyelesaikan hak *ḥaḍānah* dengan melihat kepentingan anak tersebut selama dalam pernikahan maupun sudah perceraian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

<sup>6</sup> Ibrahim Lembut, Arahan Amalan No.1 Tahun 2010, Penentuan Kasus Yang Perlu Dirujuk Ke Majelis Sulh Pada Peringkat Pendaftaran Kasus, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 28 Julai 2010, hal. 3-4.

Pelaksanaan Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Selangor adalah berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Provinsi Selangor) 1/2003, Enakmen Qanun Prosedur Mal Syariah (Provinsi Selangor) No. 7/1991, dan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah (Provinsi Selangor) No.4/2003, (KTMSS01 belum diperbaharui mengikut Enakmen 2003), Pasal 99 Undang-undang Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah (Selangor) 2003,<sup>7</sup> Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Provinsi Selangor) 2/2003, Manual Kerja *Ṣulḥ* JKSM dan Pekeliling Ketua Hakim MSS 1/2002 (Kod Etika Pegawai *Ṣulḥ* dan Manual Kerja *Ṣulḥ* MSS), Pekeliling Ketua Hakim MSS 9/2002 [ Bidang kuasa Pegawai *Ṣulḥ* (Hakim) ], Arahan Amalan JKSM 3/2002 (Pemakaian *Ṣulḥ*), Arahan Amalan JKSM 7/2002 (Pola menyimpan dan Melupakan Catatan Pegawai *Ṣulḥ*) dan Arahan Amalan JKSM 8/2002 (Prosedur Penyerahan Notis *Ṣulḥ*).<sup>8</sup>

Prosedur pelaksanaan di Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Selangor berdasarkan Manual Kerja *Ṣulḥ*. Manual Kerja *Ṣulḥ* yang dilaksanakan bertujuan menjelaskan pola yang diterapkan dalam proses kerja yang perlu dijalani di dalam Majelis *Ṣulḥ* dan Kod Etika Pegawai *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Provinsi Selangor. Sekiranya kedua pihak yang bertikai merasakan perlu menjalani proses *Ṣulḥ* boleh memohon untuk berbuat demikian demi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa mengikut hukum syarak walaupun sedang berada dalam proses di mahkamah.

---

<sup>7</sup> Enakmen 4 Tahun 2003, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 Bahagian Xiii - Penyelesaian, Penarikan Balik dan Pemberhentian

<sup>8</sup> Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab. Rahman, Arahan Amalan No. 8 Tahun 2002, Tempoh Masa Pengemukaan Nota Perbicaraan Bagi Maksud Rayuan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 23 ogos 2002.

Tatacara Mal *Ṣulḥ* juga turut memperuntukkan dan memberi kuasa kepada Jawatankuasa Mahkamah Syari'ah membuat peruntukan mengenai tatacara dan amalan kantor pendaftaran Mahkamah.<sup>9</sup>

Adapun prosedur dan proses kerja *Ṣulḥ* dalam menyelesaikan pertikaian keluarga dalam mediasi di Majelis *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor diilustrasikan dalam skema dibawah ini:

Tabel 1: Skema Proses Kerja *Ṣulḥ*

| JABATAN                      | PROSES KERJA                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proses                       | Pendaftaran                                                                                                                                                   |
|                              | Panitera atau Wakil Panitera                                                                                                                                  |
|                              | -Menerima berkas kasus dari wakil panitera<br>-Tetapkan tanggal sebutan atau <i>Ṣulḥ</i> kepada para pihak                                                    |
|                              | Pegawai <i>Ṣulḥ</i>                                                                                                                                           |
|                              | -Majelis <i>Ṣulḥ</i> dijalankan di hadapan Pegawai <i>Ṣulḥ</i><br>-Jika tiada persetujuan untuk melaksanakan <i>Ṣulḥ</i> tanggal persidangan harus ditetapkan |
|                              | Wakil Panitera                                                                                                                                                |
|                              | -Jika ada kesepakatan keseluruhannya atau sebagainya, harus dicatat dan mengajukan berkas kepada hakim untuk dibicarakan                                      |
| Hakim                        | -Melaksanakan penghakiman dan Perintah Kesepakatan (Tugas kehakiman dalam menindak lanjuti proses)                                                            |
| Proses Pngeluaran Perintah   |                                                                                                                                                               |
| Panitera atau Wakil Panitera | -Menyedia dan memeriksa draf perintah dari para pihak                                                                                                         |
| Hakim                        | -Tandatangan dan meterai perintah                                                                                                                             |
| Panitera atau Wakil Panitera | - Penyampai perintah kepada para pihak                                                                                                                        |

<sup>9</sup> Hammad Bin Mohamad Dahalan, *Kedudukan Pegawai Ṣulḥ...*, hlm. 5083

Sumber dari : Pegawai *Şulh* Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

### **3.3. Pola yang di Terapkan Majelis *Şulh* dalam Mediasi Pertikaian Keluarga Mahkamah Syari'ah Selangor.**

Pola yang di terapkan Majelis *Şulh* dalam menyelesaikan mediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Syari'ah di setiap negeri masing-masing dan juga mereka diberikan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sebagai pegawai *Şulh*.<sup>10</sup>

#### **3.3.1. Pola Majelis *Şulh* di Mahkamah Syariah Selangor.**

Pola yang diterapkan dalam menyelesaikan pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor berdasarkan Manual Kerja *Şulh* yang dikeluarkan dalam Pekeliling Ketua Hakim Mahkamah Syari'ah Selangor, isi kandungan setiap proses berdasarkan uraian didalam Manual tersebut:

##### **1) Kenyataan Awal Pegawai *Şulh***

Memperkenalkan diri, membaca *Al-Fātiḥah* dan menjelaskan undang-undang yang dipakai, tujuan *Şulh*, peraturan yang patut dipatuhi, serta proses yang akan dilalui.

##### **2) Pemaparan Awal Pihak Yang Bertikai**

Penggugat (plaintif) memaparkan terlebih dahulu, tergugat (defendan) menjelaskan pertikaianya, Pegawai *Şulh* membuat peta konflik, meneliti dan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *Şulh* Mahakamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

mengurus informasi yang diberi untuk menentukan isu, kedudukan, dan kepentingan pihak yang bertikai.

### 3) Perundingan Bersama Pihak-pihak yang terlibat

Menyampaikan pendapat, penilaian dari pegawai *Şulh*, apabila persetujuan diperoleh maka pegawai boleh terus membuat draf perjanjian penyelesaian tanpa perlu mengikuti proses selanjutnya.

### 4) Pertemuan Sebelah Pihak (kaukus)

Penggugat (plaintif) dipanggil dahulu diikuti tergugat (defendan), pegawai *Şulh* menyeimbangkan keadaan, melihat kelemahan setiap pihak, *brain storming*, pegawai adil dalam masa pertemuan bersama pihak.

### 5) Perundingan Bersama

Setelah pertemuan sebelah pihak (kaukus) telah diselesaikan, maka proses selanjutnya pihak yang bertikai diteruskan dengan perundingan bersama. Jika didapati pihak yang terlibat tidak ada titik temu, pihak yang terlibat boleh mengulangi proses perbincangan. Hal ini untuk menghindari proses selanjutnya (proses persidangan penghakiman).

### 6) Penghakiman Berasaskan Persetujuan

Draf perjanjian penyelesaian yang telah dipersetujui oleh pihak bertikai hendaklah ditandatangani di hadapan pegawai *Şulh*. Draf itu kemudiannya akan diserahkan oleh pegawai *Şulh* kepada pihak mahkamah untuk dicatat sebagai penghakiman berasaskan persetujuan.

#### 7) Kasus Diserahkan Kembali

Persetujuan yang tidak disepakati selebihnya (syarat yang tidak dipersetujui) diserahkan ke proses persidangan.<sup>11</sup>

Pusat Mediasi Malaysia membantu klien dengan menyediakan jadwal proses dan penerangan ringkas sebelum mediasi dimulai. Sebagaimana digariskan dalam Mediasi Kit, proses mediasi mengikuti urutan seperti berikut:

1. Proses Pra Mediasi : Pihak-pihak sengketa menandatangani persetujuan syarat-syarat menjalani mediasi.
2. Pengenalan : Pengenalan kepada Mediasi.
3. Pemaparan awal dari Mediator : Penetapan peraturan perundingan dari mediator. Mediator diinformasikan tentang beberapa fakta mengenai pertikaian.
4. Sesi bersama : Pihak yang bersengketa dibenarkan untuk menyatakan klaim dengan kehadiran pihak satu lagi.
5. Perjumpaan sebelah pihak : Sekiranya perlu salah satu pihak boleh bersama mediator secara sepihak bagi menyatakan emosi dan bercakap dengan bebas.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *Ṣulḥ* Mahakamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 24 April 2018

6. Perjanjian persetujuan : Pihak-pihak yang bersengketa menandatangani perjanjian penyelesaian disaksikan oleh mediator. Pihak-pihak yang bersengketa boleh mendaftarkan gugatan kasus di mahkamah sekiranya tidak ada titik temu dalam mediasi. Pegacara kedua-dua belah pihak atau pihak mediator boleh menyediakan perjanjian sekiranya ada penyelesaian.<sup>12</sup>

Tidak terdapat banyak perbezaan antara proses *Şulh* dan mediasi, ini adalah kerana tujuan utama proses dilakukan adalah untuk mencapai kata kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, bahwa proses *Şulh* sedikit banyak diadaptasi daripada mediasi dengan sebagian penyesuaian, mengadaptasikan ini untuk menonjolkan identitas Islam misalnya bacaan doa pada permulaan dan unsur litigasi dengan mendukung pada akhir proses sekiranya berhasil.

### **3.3.2. Latihan Pegawai *Şulh*.**

Hasil inisiatif Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia. Pegawai *Şulh* dilatih dan diberi akreditasi oleh *Accord Group* setelah mengikuti kursus selama 40 jam secara bertingkat. Sejak tahun 2006 kantor yang terletak di Sydney Australia ini berpengalaman dalam melaksanakan pelatihan mediasi di Hong Kong, Singapura, Philipina, New Zealand dan Australia.

Dalam konteks Mahkamah Syari'ah Selangor, latihan berbentuk konseling turut disertai oleh pegawai *Şulh* yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *Şulh* Mahkamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 14 September 2018



Awam (*JPA*) dan pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (*JKSM*). Hasil wawancara dengan pegawai *Şulh*, Tuan Muhammad Suhail menyatakan kemampuan konseling banyak membantu pegawai mengendalikan klien *Şulh* yang bermasalah. Mediator yang terdaftar di Pusat Mediasi Malaysia ada yang mendapat latihan dari perusahaan yang sama. Ini menjadikan latihan yang dijalani dan akreditasi yang diperoleh pegawai *Şulh* adalah setaraf dengan mediator yang lain. Antara keahlian yang diberi penekanan oleh *Accord Group* dalam kursus pengurusan mediasi adalah:

- 1) *Negosiasi*–Kemampuan berunding, tujuan perundingan selalunya untuk menulis persetujuan.
- 2) *Mendegar*–*Mendengar* dan memahami, menunjukkan perhatian dan simpati. Bahasa tubuh juga sebagian dari mendengar. Boleh mengetahui niat tersembunyi jika pertanyaan yang tepat ditujukan kepada pihak bertikai hasil dari pemahaman mediator terhadap sesuatu isu.
- 3) *Ringkasan*–*Kesimpulan* yang dibuat oleh mediator untuk memberi pemahaman pihak-pihak situasi sebenar. Dibuat setiap kali pihak selesai memberi kenyataan, kesimpulan juga boleh membantu pihak melihat isu dengan lebih besar.
- 4) *Kesamaan*–Kemampuan mencari titik persamaan antara pihak-pihak yang bersengketa, perlu mengetahui bagi mengelakkan isu dan fakta yang tidak berkaitan dimasukkan dalam perundingan.

- 5) Mengatur Susunan Perjalanan Perundingan–Mengatur perjalanan proses majelis untuk ditulis, agar perhatian pihak-pihak tidak keluar dari tujuan yang dikehendaki, perjalanan majelis harus adil yaitu tidak berpihak kepada salah satu pihak.
- 6) Mengubah Sudut Pandang–Kemampuan mediator dalam mengeluarkan ungkapan positif atau netral membantu pihak-pihak membina persepsi yang baik kepada pihak yang lain.
- 7) Mengidentifikasi Tujuan dan Kebutuhan–Kemampuan mengemukakan persoalan untuk membantu pihak mengenai kebutuhan dan kemauan dari pihak yang bersengketa. Keutamaan harus diberikan kepada kebutuhan dan objektif bukan sekadar hak dan kemauan
- 8) Membangkitkan Keraguan–Mencipta keraguan dengan pertanyaan tentang kedudukan pihak sekiranya pertikaian tidak dapat diselesaikan. Dalam banyak situasi pihak yang bertikai susah untuk berfikir secara rasional. Dalam pertanyaan itu menggunakan perkataan ‘jika’, ‘kalau’, ‘bagaimana sekiranya’ dan sebagainya.
- 9) Diplomati–Kemampuan diplomasi, menggunakan kembali perkataan positif yang diucapkan oleh pihak yang bertikai, menyentuh secara tidak langsung keegoan pihak.
- 10) Intervensi–Memotong percakapan, kemampuan terbesar dalam mediasi adalah mengetahui masa yang sesuai untuk memotong percakapan pihak

yang bersengketa, terlalu banyak atau tidak memotong percakapan langsung memberi dampak kepada persepsi pihak-pihak yang sengketa terhadap mediator.

- 11) Mengemukakan Pertanyaan–Kemampuan mengemukakan pertanyaan, membantu pihak-pihak menuju kepada penyelesaian dengan meminta kerjasama pihak yang bersengketa dan pertanyaan yang sesuai, ini lebih sesuai daripada mengeluarkan kenyataan.
- 12) Memecah kebuntuan–Memecah kebuntuan dengan meninggalkan isu yang susah dan meneruskan isu yang mudah.<sup>13</sup>

Pengalaman mengendalikan latihan oleh *Accord Group* di berbagai negara secara tidak langsung mengangkat kewibawaan pegawai *Şulh* yang sukses mendapat akreditasi dari perusahaan tersebut. Malah ia turut meningkatkan imej Mahkamah Syari'ah kerana mempunyai pegawai yang dilatih oleh perusahaan bertaraf internasional. Setiap pegawai *Şulh* harus berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya setifikat akreditasi mediasi dari *Accord Group* untuk mengekalkan mutu serta kualitas Majelis *Şulh*.

### **3.4. Efektivitas Majelis *Şulh* dalam Memediasi Pertikaian Keluarga Mahkamah Syari'ah Selangor.**

Pada umumnya, pola penyelesaian yang diterapkan Majelis *Şulh* telah menunjukkan dampak yang positif. Pada tahun 2002 pola ini berhasil mengurangkan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *Şulh* Mahkamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 14 September 2018

hampir 65% kasus di Mahkamah Syari'ah Selangor sejak Majelis *Ṣulḥ* dilaksanakan pada tahun 2001. Hasil wawancara bersama pegawai *Ṣulḥ* Tuan Syafiq dan merupakan Hakim Mahkamah Syari'ah Selangor menyatakan faktor utama kasus berhasil diselesaikan melalui pola yang diterapkan *Ṣulḥ* banyak bergantung kepada sikap dan keterbukaan pihak-pihak yang terlibat di dalam Majelis *Ṣulḥ*.<sup>14</sup> Berikut di antara faktor-faktor tersebut:

- 1) Kedua belah pihak yang bertikai mempunyai keinginan untuk menyelesaikan klaim dengan secara damai
- 2) Kedua pihak yang bertikai bersedia memberi kerjasama dan bersedia bernegosiasi dengan tulus ikhlas, bukannya beremosional.
- 3) Kedua belah pihak yang bersengketa sadar bahwa penyelesaian adalah untuk kepentingan masa depan.
- 4) Kedua belah pihak yang bersengketa sadar akan pro dan kontra jika kasus dibawa ke proses persidangan.

Pola yang diterapkan Majelis *Ṣulḥ* ini juga menarik perhatian pihak-pihak untuk menghadiri Majelis *Ṣulḥ* berdasarkan penerapannya yaitu pola ini menjanjikan penyelesaian sengketa secara konsep situasi sama-sama untung (*“win-win situation”*) di antara pihak sengketa dan tidak ada pihak yang kalah. Pola *Ṣulḥ* ini menekankan asas kerahasiaan kedua belah pihak yang bersengketa di mana hal yang dibahas di

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

Majelis *Ṣulḥ* bersifat rahasia hanya pegawai *Ṣulḥ* yang mengetahuinya, itu tidak akan ditemukan dalam persidangan di Mahkamah Syari'ah.<sup>15</sup>

Tabel 2 : Statistik Keseluruhan Kasus *Ṣulḥ*.

| No | Tahun  | Daftar Kasus Majelis <i>Ṣulḥ</i> | Kasus ditangani Majelis <i>Ṣulḥ</i>   |                                       |                       | Persen Kasus Selesai (%) | Persen Kasus Tidak Selesai (%) | Persen Kasus di tangani (%) |
|----|--------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|    |        |                                  | Kasus berhasil di Majelis <i>Ṣulḥ</i> | Kasus tidak Selesai Tahap Persidangan | Kasus Tidak di Hadiri |                          |                                |                             |
| 1  | 2013   | 2491                             | 1048                                  | 564                                   | 666                   | 65%                      | 35%                            | 91%                         |
| 2  | 2014   | 2534                             | 1045                                  | 484                                   | 758                   | 68%                      | 32%                            | 90%                         |
| 3  | 2015   | 2598                             | 1144                                  | 463                                   | 631                   | 71%                      | 29%                            | 86%                         |
| 4  | 2016   | 2972                             | 1325                                  | 487                                   | 789                   | 73%                      | 27%                            | 88%                         |
| 5  | 2017   | 3367                             | 1363                                  | 564                                   | 1024                  | 71%                      | 29%                            | 88%                         |
| 6  | Jumlah | 13962                            | 5925                                  | 2562                                  | 3868                  | 69%                      | 31%                            | 88%                         |

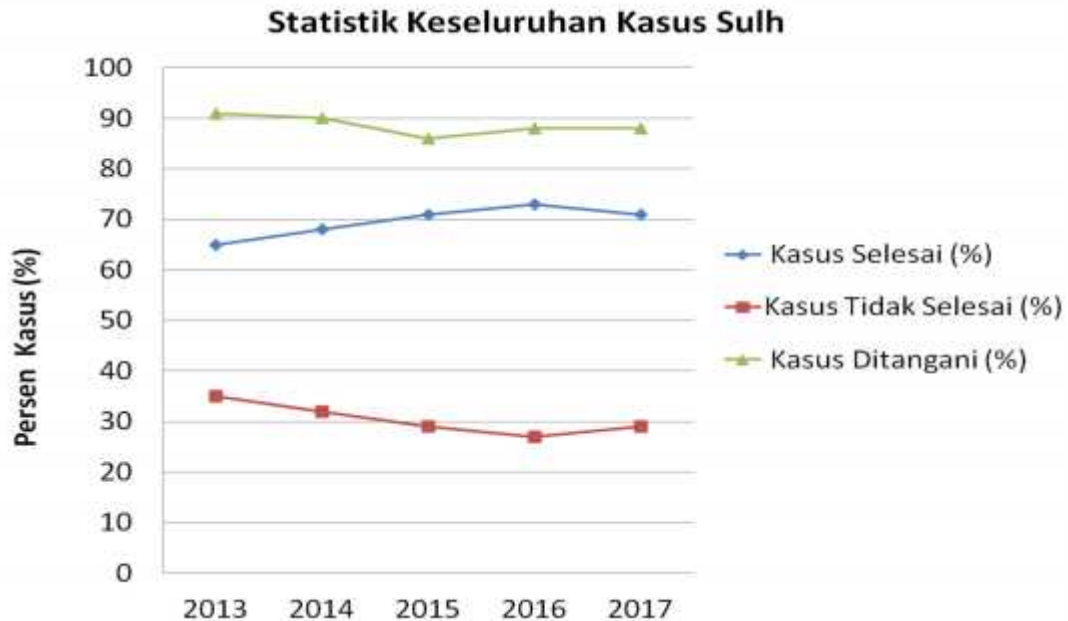
Sumber dari : Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

Pada tahun 2013 hingga 2017, telah dicatat sebanyak 13962 kasus yang meliputi kasus klaim atau permohonan. Seperti kasus melanggar janji untuk menikah atau pertunangan, klaim yang muncul dari suatu perceraian seperti nafkah iddah, harta bersama, hak asuh anak (*ḥaḍānah*), dan lain-lain. Dari angka kasus tersebut, pihak Majelis *Ṣulḥ* berhasil menyelesaikan sebanyak 5925 kasus, 2562 kasus tidak

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

selesai, dan 3868 kasus para pihak tidak menghadiri. Kasus yang paling banyak didaftarkan di Majelis *Ṣulḥ* di Selangor berkaitan nafkah anak.<sup>16</sup>

Diagram 1 : Grafik Statistik Keseluruhan Kasus *Ṣulḥ*



Sumber dari : Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

Berdasarkan grafik statistik yang penulis buat di diagram 1 dapat dilihat persentase kasus selesai dari tahun 2013 hingga 2017 semakin meningkat dari tahun ke tahun dan tidak turun dari 65% menunjukkan adanya efektivitas dalam mengurangi peningkatan kasus di Mahkamah Syariah Selangor selama 5 tahun dan menunjukkan pola yang diterapkan memberi kesuksesan dalam menyelesaikan kasus di Majelis *Ṣulḥ*. Persentase Kasus tidak selesai di Majelis *Ṣulḥ* akan dianggap gagal apabila salah satu pihak tidak ada kesepakatan dalam menyelesaikan pertikaian di

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

Majelis *Ṣulḥ* dan pihak bertikai tidak menghadiri ke Majelis *Ṣulḥ* untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Tuan Suhail dan merupakan pegawai *Ṣulḥ*, pihak yang gagal menghadiri ke Majelis *Ṣulḥ* pada tanggal ditetapkan, maka perlu menginformasikan hal tersebut kepada pihak Mahkamah Syari'ah dengan berdasarkan alasan yang jelas. Apabila tidak hadir, dan tanpa alasan yang jelas ia merupakan satu penghinaan kepada pihak mahkamah. Tindakan pihak yang gagal hadir ke Majelis *Ṣulḥ* dengan sengaja tanpa alasan akan dikenakan denda sebanyak Rp 10.000000 juta rupiah (RM 3.000 ribu ringgit) dan sekiranya gagal membayar denda akan dikenakan hukuman penjara.<sup>17</sup>

Menurut pegawai *Ṣulḥ* Tuan Syafiq, kasus-kasus yang rumit tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak juga mempunyai probabilitas yang tinggi untuk diselesaikan dan akan melalui proses persidangan di Mahkamah Syari'ah. Akan tetapi Majelis *Ṣulḥ* di provinsi Selangor pegawai *Ṣulḥ* yang dilantik mempunyai wewenang menjadi hakim apabila kegagalan berlaku dalam proses *Ṣulḥ*. Wewenang ini tidak berlaku di provinsi lain selain dari Selangor.<sup>18</sup>

Wewenang yang diberikan pegawai *Ṣulḥ* yang di tunjuk menjadi hakim atas kebijaksanaan Ketua Hakim Mahkamah Syari'ah Selangor karena Selangor merupakan provinsi tertinggi kasus pertikaian keluarga di Malaysia. Kegagalan pola

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *Ṣulḥ* Mahakamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 14 September 2018

<sup>18</sup>. Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *Ṣulḥ* Mahakamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

yang diterapkan *Ṣulḥ* ini akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian dan menambah angka kasus di mahkamah yang semakin hari semakin bertambah. Kesuksesan suatu Majelis *Ṣulḥ* banyak bergantung kepada pola yang diterapkan dan faktor pihak yang bertikai.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, setiap pihak yang menghadiri ke Majelis *Ṣulḥ* haruslah mencari penyelesaian dan kesepakatan. Pihak yang bertikai haruslah berfikiran terbuka dalam menghadiri proses *Ṣulḥ* karena dari sifat keterbukaan pihak bertikai penyelesaian dan kesepakatan dapat dicapai. Setiap pihak yang menghadiri ke Majelis *Ṣulḥ* tidak melakukan sesuatu perkara diluar jangkauan mengakibatkan perkara buruk berlaku. Untuk menghindari dari melakukan perkara-perkara yang tidak baik, pihak bertikai haruslah sadar tentang proses penyelesaian yang dilalui di Majelis *Ṣulḥ*.

### **3.5. Tahap Kepuasan Pihak Bertikai yang Menghadiri Majelis *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor.**

Satu kajian telah dilakukan di Mahkamah Syari'ah Selangor untuk mengetahui tahap kepuasan masyarakat yang menghadiri pertikain keluarga di Majelis *Ṣulḥ* yang terdapat di dalam sistem perundangan Mahkamah Syari'ah.

#### **. a) Demografi Responden**

Demografi bagi setiap responden bagi survei ini di ambil berdasarkan usia, status perkawinan, status pekerjaan dan jenis kelamin. Tujuan survei demografi

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor



responden adalah untuk mengetahui latar belakang responden secara umum untuk membantu kajian yang dijalankan.

Bagi latar belakang mengikut umur pihak responden sebanyak 25% dikalangan responden ada yang berumur 18 hingga 25 Tahun. 35% dari jumlah responden adalah berusia 26 hingga 30. 20% responden yang berumur 31 hingga 35 tahun sedangkan 20% responden berumur 36 hingga 40 tahun. Tidak ada responden yang berusia 41 tahun ke atas.

Bagi latar belakang mengikut status perkawinan, sebanyak 10% responden berkawin dan 90% dari responden telah berkawin dan bercerai. Untuk status pekerjaan juga, di dalam survei ini telah dibagi kepada pegawai kerajaan, pegawai swasta, bekerja sendiri dan tidak bekerja. Hasil kajian didapati bahwa sebanyak 30% responden pegawai kerajaan, 35% merupakan responden pegawai swasta, 25% responden kerja sendiri dan 10% lainnya merupakan responden tidak bekerja. Untuk latar belakang yang mengikut jenis kelamin sebanyak 50% responden adalah di kalangan laki-laki, 50% responden adalah perempuan.

#### **b) Hasil Kajian.**

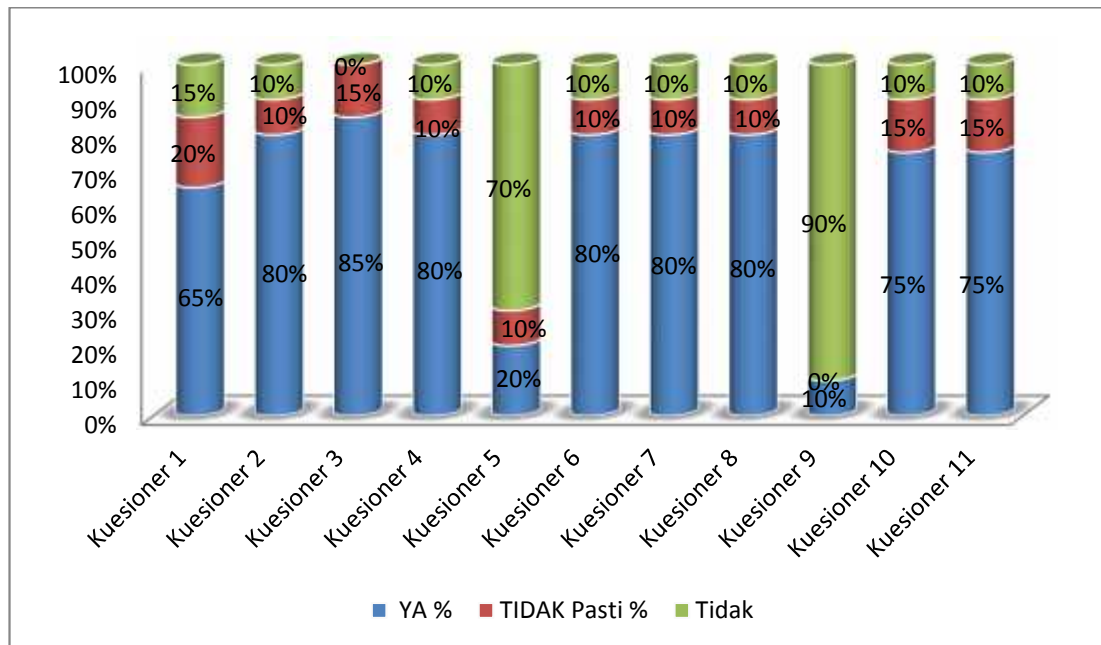
Terdapat 11 pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak responden untuk tujuan mengenal tahap kepuasan masyarakat terhadap Majelis *Şulh* di Mahkamah Syari'ah Selangor dan kesemua kuesioner adalah umum terhadap responden yang menghadiri ke Majelis *Şulh*.

Tabel 3 : Persentase Keseluruhan Responden Menjawab Kuesioner Yang Menghadiri ke Majelis *Ṣulḥ*

| No | Tema                                                                                                                            | Persentase % |             |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
|    |                                                                                                                                 | Ya           | Tidak Pasti | Tidak |
| 1  | Puas dengan pelayanan Majelis <i>Ṣulḥ</i> di Mahkamah Syariah Selangor                                                          | 65%          | 20%         | 15%   |
| 2  | Pernah Mengetahui Kewujudan Majelis <i>Ṣulḥ</i> di Mahkamah Syariah Selangor                                                    | 80%          | 10%         | 10%   |
| 3  | Keberadaan Majelis <i>Ṣulḥ</i> dapat membuka pandangan positif masyarakat                                                       | 85%          | 15%         | -     |
| 4  | Puas dengan pola yang diterapkan oleh Majelis <i>Ṣulḥ</i>                                                                       | 80%          | 10%         | 10%   |
| 5  | Haruskah perbaikan pola penyelesaian yang diterapkan oleh Majelis <i>Ṣulḥ</i>                                                   | 20%          | 10%         | 70%   |
| 6  | Masa pelaksanaan Majelis <i>Ṣulḥ</i> dapat menghematkan waktu                                                                   | 80%          | 10%         | 10%   |
| 7  | Biaya yang harus dibayar ke Majelis <i>Ṣulḥ</i> meringankan beban                                                               | 80%          | 10%         | 10%   |
| 8  | Menghadiri ke Majelis <i>Ṣulḥ</i> dapat menghilangkan stres dari persidangan                                                    | 80%          | 10%         | 10%   |
| 9  | Proses pelaksanaan di Majelis <i>Ṣulḥ</i> sangat sulit                                                                          | 10%          | -           | 90%   |
| 10 | Puas dengan peran Majelis <i>Ṣulḥ</i> menjadi mediator                                                                          | 75%          | 15%         | 10%   |
| 11 | Penyelesaian kasus pertikaian keluarga di Majelis <i>Ṣulḥ</i> di Mahkamah Syariah Selangor dapat mengurangkan peningkatan kasus | 75%          | 15%         | 10%   |
| 12 | Jumlah                                                                                                                          | 66%          | 12%         | 22%   |

Sumber dari : Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

Diagram 2 : Grafik Persentase Responden Yang Menjawab Kuesioner



Sumber dari : Pegawai *Şulh* Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

Kuesioner pertama tentang apakah anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Majelis *Şulh* di Mahkamah Syari'ah Selangor. 65% pihak responden menyatakan Ya dan 20% menyatakan Tidak pasti dan 15% menyatakan Tidak. Melalui survei kuesioner kedua didapati bahwa 80% dari pihak responden pernah mendengar dan mengetahui secara umum tentang Majelis *Şulh* di Mahkamah Syari'ah baik dari media cetak, radio, kawan atau media sosial. 10% menyatakan Tidak pasti dan 10% lagi Tidak.

Kuesioner ketiga tentang keberadaan Majelis *Şulh* di bawah Mahkamah Syari'ah dapat membuka pandangan positif kepada masyarakat. Didapati bahwa 85%

menyatakan Ya dan 15% Tidak pasti. Mengenai kuesioner keempat tentang pola yang diterapkan Majelis *Ṣulḥ* dalam mediasi, pihak responden puas dengan pola yang diterapkan bahwa 80% responden menyatakan Ya, 10% Tidak pasti dan 10% Tidak. Kuesioner kelima terkait mengenai haruskah perbaikan pola penyelesaian yang diterapkan oleh Majelis *Ṣulḥ* didapati 20% responden menyatakan Ya, 10% Tidak pasti dan 70% Tidak. Berarti pola yang diterapkan Majelis *Ṣulḥ* tidak perlu penambah baik dari penilaian pihak yang menghadiri Majelis *Ṣulḥ*.

Melalui survei kuesioner keenam, ketujuh dan delapan mempunyai persentase responden yang sama. Didapati bahwa 80% pihak responden menyatakan Ya dan bersetuju tentang Majelis *Ṣulḥ* dapat meringankan biaya, meghematkan waktu dan dapat mengurangi stres dibandingkan di persidangan dan 10% menyatakan Tidak pasti dan 10% Tidak. Kuesioner kesembilan terkait tentang apakah proses mediasi yang dilakukan oleh Majelis *Ṣulḥ* sangat sulit didapati bahwa 10% menyatakan Ya dan 90% Tidak karena proses di Majelis *Ṣulḥ* tidak sesulit di persidangan.

Mengenai kuesioner kesepuluh dan kesebelas mempunyai persentase yang sama dari pihak responden didapati bahwa 75% menyatakan Ya dengan peran pegawai *Ṣulḥ* menjadi mediator dan penyelesaian di Majelis *Ṣulḥ* dapat mengurangi kasus yang meningkat di Mahkamah Syari'ah. 15% dari pihak responden menyatakan Tidak pasti dan 10% Tidak.

Kesimpulan dari hasil survei kuesioner ini penulis mendapati responden yang menghadiri Majelis *Ṣulḥ* ini, secara umumnya sangat puas dengan pelayanan dan pola

yang diterapkan oleh Majelis *Ṣulḥ*. Pihak bertikai yang menghadiri juga dapat menghematkan waktu dan meringankan biaya melalui proses Majelis *Ṣulḥ* berbanding proses di persidangan. Masyarakat bisa menyelesaikan pertikaian secara damai dengan menggunakan pelayanan Majelis *Ṣulḥ* sebelum melanjutkan proses persidangan

### **3.6. Analisa Penulis.**

Berdasarkan analisa dari apa yang dapat penulis simpulkan dalam menyiapkan skripsi ini, bahwa konflik dan pertikaian adalah fitrah yang alami dalam kehidupan manusia. Konflik dan pertikaian sering terjadi dalam rumah tangga apabila satu pihak menghalang, menekan atau memaksa pihak kedua menerima pendapatnya yang kemudiannya pihak ini terasa tergugat dengan tindakan pihak yang pertama. Meskipun pertikaian boleh diselesaikan oleh pihak-pihak berkonflik namun kerap kali kasus kekeluargaan di bawa ke Mahkamah Syari'ah.

Kebanyakan manusia hari ini mau menyelesaikan masalah, pertikaian atau konflik dengan melihat dan memahami permasalahan yang dihadapi mengikut pandangan mereka sendiri tanpa berusaha memahaminya melalui pandangan pihak ketiga. Ini menyebabkan pertikaian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna dan konflik masih terus berlaku. Peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah amat dibutuhkan.

Masyarakat Islam di Malaysia sering menggunakan Mahkamah Syari'ah sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian antara suami dan istri.

Mahkamah Syari'ah dianggap sebagai satu institusi mulia yang diharapkan boleh mendapatkan keadilan untuk suami dan istri yang sedang bersengketa. Tetapi bila tiada persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa akan mengakibatkan kelambatan proses penyelesaian di persidangan dan penambahan kasus di Mahkamah Syari'ah.

Jesteru itu, diwujudkan Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syariah Selangor untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak Mahkamah Syari'ah. Terdapat pola yang diterapkan oleh Majelis *Ṣulḥ* untuk memastikan setiap kasus yang diselesaikan membawa keberhasilan. Pola ini dibuat agar kerja yang dijalankan oleh pegawai *Ṣulḥ* dalam proses perundingan berjalan dengan sistematika.

Selain itu, pegawai *Ṣulḥ* akan di berikan latihan selama 40 jam secara bertingkat agar mempunyai kualitas dalam pelaksanaan menyelesaikan kasus di Majelis *Ṣulḥ*. Latihan yang dijalani oleh pegawai *Ṣulḥ* untuk memastikan setiap pegawai *Ṣulḥ* mendapat sertifikat akreditasi mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Syari'ah bertindak menyelesaikan konflik dan pertikaian dengan melantik pegawai *Ṣulḥ* untuk penyelesaian melalui Majelis *Ṣulḥ*. Terdapat dua ciri utama yang menjadi asas penyelesaian pertikaian yaitu tidak bertentangan dengan hukum syarak dan undang-undang dan persetujuan bersama. Penyelesaian diperoleh melalui pegawai *Ṣulḥ* yang berperan sebagai mediator dan konseling.

Apabila Enekmén Pentadbiran Keluarga Islam diperkenalkan Mahkamah Syari'ah di Selangor telah menetapkan bahawa kasus berkaitan pertikaian keluarga Islam hendaklah melalui pegawai *Ṣulḥ* sebelum di bawa ke depan hakim. Satu surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada pihak-pihak berkonflik untuk menghadiri sesi perundingan dengan pegawai *Ṣulḥ* dan pihak yang berkonflik wajib menghadirinya.

Proses perundingan hendaklah dijalankan tidak melebihi tiga bulan untuk mencari jalan kesepakatan. Seandainya penyelesaian tidak diperolehi, pegawai *Ṣulḥ* boleh merekomendasikan untuk diperpanjang atau dibawa ke depan hakim untuk proses persidangan. Pegawai *Ṣulḥ* di pertanggungjawabkan untuk melaksanakan negosiasi sehingga kesepakatan bersama dicapai. Pola yang diterapkan *Ṣulḥ* yang dilaksanakan di Selangor memiliki ciri-ciri mediasi dan telah menunjukkan keberhasilan yaitu dapat menyelesaikan sebagian besar pertikaian suami-istri bagi kasus Mal (kekeluargaan) tanpa menjalani proses persidangan di Mahkamah Syari'ah.

Sejak kaedah *Ṣulḥ* diperkenalkan di Mahkamah Syari'ah Selangor, banyak kasus dapat diselesaikan di luar mahkamah. Pada tahun 2017 dari Januari hingga Desember 2017, daripada 3367 kasus yang didaftarkan kepada Majelis *Ṣulḥ*, 1363 kasus berhasil diselesaikan, 564 kasus dibawa ke depan hakim untuk persidangan, sebagian sisa 1024 kasus tidak dihadiri oleh pihak bertikai. Pada persentase kasus

berhasil diselesaikan 71% dan persentase kasus yang ditangani oleh Majelis *Ṣulḥ* 88%.<sup>20</sup>

Dari persentase yang dinyatakan pola yang diterapkan oleh Majelis *Ṣulḥ* dalam mediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor menunjukkan efektivitas dalam mengurangi kasus yang meningkat dan membantu meringankan beban yang dilalui oleh pihak Mahkamah Syari'ah. Jika dilihat banyak kebaikan yang menerusi pelaksanaan Majelis *Ṣulḥ* dan pihak yang menghadiri *Ṣulḥ* sangat puas dengan pola yang diterapkan oleh Majelis *Ṣulḥ*.

Selain itu juga, peneliti membuat kuesioner untuk mengetahui tahap kepuasan pihak yang menghadiri ke Majelis *Ṣulḥ*. Dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh peneliti didapati pihak yang menghadiri ke Majelis *Ṣulḥ* sangat puas dengan pola yang diterapkan di Majelis *Ṣulḥ* dan membantu pihak bertikai untuk mendapatkan jalan kesepakatan tanpa ada kerugian. Ini membuktikan bahwa Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah sangat membantu pihak yang bertikai dalam menyelesaikan kasus.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *Ṣulḥ* Mahkamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 24 April 2018



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Bab empat ini sebagai bab akhir dari karya ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Maka dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan tentang efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam memediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor adalah sebagai berikut :

1. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pola yang di terapkan Majelis *Ṣulḥ* membantu pegawai *Ṣulḥ* menjalankan proses penyelesaian kepada pihak bertikai. Karena proses yang berhasil di Majelis *Ṣulḥ* tidak perlu melalui proses persidangan dan proses yang gagal akan melalui proses ke tahap persidangan. Pola yang diterapkan lebih efektif berbanding pola di persidangan karena di Majelis *Ṣulḥ* pihak bertikai dapat mengklaim hak masing-masing tanpa ada kerugian antara kedua belah pihak (*win-win situation*).
2. Penulis mendapati bahwa Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Selangor ternyata sangat efektif dalam penyelesaian kasus yang didaftarkan seperti nafkah anak, hak *ḥaḍānah*, harta bersama dan kasus-kasus yang lain. Berdasarkan statistik yang dicatatkan dari tahun 2013–2017 sebanyak 13,962 kasus yang di daftarkan dan kasus berhasil diselesaikan sebanyak 5925 kasus, tidak berhasil 2562 kasus dan para pihak tidak menghadiri sebanyak 3868 kasus. Dari angka kasus yang dinyatakan, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang menghadiri Majelis *Ṣulḥ* sangat puas dengan pola yang diterapkan Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Selangor dan sangat efektif kepada pihak yang berselisih untuk mendapatkan jalan penyelesaian.

#### **4.2. Saran-saran**

Saran-saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Di harapkan pihak Mahkamah Syari'ah perlu ada penyuluhan-penyuluhan hukum sebagai sosialisasi baik melalui media cetak, seminar mengenai mediasi di Majelis *Ṣulḥ* agar memberi kesadaran hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat mengenali Majelis *Ṣulḥ*.
2. Penulis dapat menyatakan pola *Ṣulḥ* akan lebih efektif, jika peran yang dilaksanakan terlibat oleh semua pihak. Pengacara harus mendorong pihak-pihak pertikaian melalui proses Majelis *Ṣulḥ* dan berfikiran terbuka dalam menghadiri Majelis *Ṣulḥ*.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al-Bassām, *Syarah Būlūghul Marām, jilid4*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- ‘Abdul Qādir Syaibah al-ḥamad, *Fiqhul Islam Syarah Būlūghul Marām Jilid 5*. Jakarta: Dārul Haq, 2007.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abū Bakar Jābir Al-Jaza’iri, *Minḥaj al-Muslim Panduan Hidup Muslim Sempurna*, cet 1. Malaysia: Karangkrif, 2015.
- Abū ‘Abdullah Muḥammad, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī*, Bierut: Dār Al-kitab Al-‘limiyah, 1992.
- Abu Dāūd Sulaimān, *Sunan Abu Dāūd*, jilid 2, Beirut: Dār fikih, 2003.
- Adzidah Yaakob, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Asmidah Ahmad, Kamilah Wati Mohd, Mustafa Afifi Ab Halim, *Pengenalan dan Keberkesanan Sulh Di Mahkamah Syariah*, Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan Edisi Pertama*, Cet2, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992
- Faiṣal bin ‘Abdul ‘Aziz ‘Alu Mubārak , *Būlūghul Marām & Penjelasannya* , Jakarta : Ummul Qura , 2015.
- Hammad, Mohamad Azhan, *Kedudukan Pegawai Sulh Di Mahkamah Syariah, (IRSYAD no 1090)*, Malaysia: Kuis, 2016.
- Hussamuddin Yaacub, *Al-Quran Perkata Kaedah Berwarna*, Malaysia: Karya Bestari, 2016,
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet.1, Indonesia: Kencana, 2011
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Muhammad Ḥasbī ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Mājid Al-Nūr Jilid 1*, surat 1-4. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Muhammad Nashiruddin Al-‘bāni, *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadis Ṣaḥīḥ dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku no 2), Cet 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Norita Kamaruddin, *Konsep Ṣulḥ Menurut Perspektif Islam Dan Aplikasinya Dalam Mahkamah Syari'ah Di Malaysia, (IRSYAD no 1002)*, Malaysia: Kuis, 2016.
- Norzulaili Mohd Ghazali, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Alquran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*. Malaysia: Kolej Universiti Islam Malayisa (KUIM), 2007
- Raihanah Azahari, *Ṣulḥ dalam Kasus Kekeluargaan Islam*, Malaysia : Universitas Malaya, 2008
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet.10, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Suzana Ghazali, *Buatmu Wanita: Sebagai Anak Istri- Ketahui Hakmu*, Selangor Darul Ehsan : Buku Prima Sdn.Bhd, 2009
- Syarizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Jaminan, Pengalihan Utang, Gadai Paksaan, Kepemilikan)*, Jilid 6 (Kuala Lumpur : Darul Fikir, 2011)

### Sumber-Sumber Lain

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah Negeri Selangor 2001 dibawah seksyen 147 (1) (c) ETMMS(S) 2003

Enakmen 4 Tahun 2003, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah (Negeri Selangor) 2003 Bahagian Xiii-Penyelesaian dan Penarikan Balik

Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor, Pelan Strategik 2015-2020 (Vol. 2), (Malaysia: JAKESS, 2015).

Ibrahim Lembut, Arahan Amalan No.1 Tahun 2010, Penentuan Kasus Yang Perlu Dirujuk Ke Majelis *Ṣulḥ* Pada Peringkat Pendaftaran Kasus, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 2010

Mahkamah Syari'ah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu Ensiklopedia Bebas*, Diakses melalui situs: [https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syari'ah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syari'ah_di_Malaysia), pada tanggal 11 April 2018

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, *Seksyen Sulh*, Diakses melalui situs: <http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp-2/bahagian-unit/bahagian-pengurusan-pendaftaran-kehakiman/seksyen-sulh>, pada tanggal 15 Mei 2018

Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab. Rahman, Arahan Amalan No. 8 Tahun 2002, Tempoh Masa Pengemukaan Nota Perbicaraan Bagi Maksud Rayuan, Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia, 2002

Seksyen 61 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 1/2003

Seksyen 99 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah (Negeri Selangor) 2003.

[www.esyariah.gov.my](http://www.esyariah.gov.my), *Esyari'ah*, Diakses melalui situs: <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/BM+Sulh/Proses+Pengendalian+Majlis+Sulh+Di+Mahkamah+Syariah>, pada tanggal 21 April 2018

## Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 2321/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2018

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL Sebagai Pembimbing I  
b. M. Ikbal, SE, MM Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam  
N I M : 160101129  
Prodi : Hukum Keluarga  
J u d u l : Efektifitas Majelis Sulh Dalam Mediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syariah Selangor
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 Juni 2018  
Dekan

  
Hasanuddin

Tembusan :

## Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2633/Un.08/FSH.I/07/2018

18 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Tinggi Syariah Selangor
2. Pegawai Sulh Mahkamah Syariah
3. Ketua Mahkamah Syariah Daerah Hulu Langat
4. Hakim Mahkamah Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam  
 NIM : 160101129  
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
 Alamat : Grand Lampeudaya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Efektifitas Majelis Sulh Dalam Mediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syariah Selangor" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 dan  
 Wakil Dekan I,  
 Rofwan Nurdin



## Lampiran 3



## جباتن كحاكيمان شريعه سلاهور دارالاحسان

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR DARUL EHSAN

BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH SULTAN IDRIS SHAH,  
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,  
40000 SHAH ALAM,  
SELANGOR DARUL EHSAN  
TEL : 03-55191291, 55191294, 55113708, 55191304  
FAXS : 03-55105620, 55126068



Laman Web : [www.jakys.gov.my](http://www.jakys.gov.my)

KEPADA

AZFAR NAUFAL BIN SAIFUL NIZZAM,  
NO. 6, TAMAN LEMBAH MEWAH, BT 15, JLN SEMENYIH,  
43000 KAJANG, SELANGOR.

**SURAT KELULUSAN PERMOHONAN DARIPADA**  
**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR**  
BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH SULTAN IDRIS SHAH  
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Ruj Kami: JAKESS-800-G/1/3 Jld B (77)  
Tarikh: 14/8/2018

**PERMOHONAN UNTUK MENGAKSES MAKLUMAT DI**  
**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR**  
**DI BAWAH ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT (NEGERI SELANGOR) 2011**

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan untuk mengakses maklumat di Jabatan ini No. Permohonan 252 diluluskan /tidak diluluskan berdasarkan Jadual Kedua, Peraturan-Peraturan yang tersebut seperti Jadual 2 di bawah -

| Bil. | Perihal                                                                                                                                                      | Fi (RM)                                         | Ditandakan Oleh Pegawai Maklumat |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | Mencari dan mendapatkan maklumat dan memulangkan maklumat ke tempat simpanan                                                                                 | 10.00                                           | (✓)                              |
| 2    | Mempertimbangkan dan membuat keputusan berhubung permohonan yang dibuat (termasuk konsultasi)                                                                | 10.00                                           | (✓)                              |
| 3    | Memantau pemeriksaan maklumat oleh pemohon                                                                                                                   | 10.00                                           | (✓)                              |
| 4    | Menyewa peralatan atau kemudahan untuk membolehkan pemohon melihat atau mendengar cakera padat, filem atau kaset                                             | Kos Sebenar                                     | ( )                              |
| 5    | Mengendalikan peralatan untuk membuat salinan cakera padat, filem atau kaset untuk membolehkan pemohon melihat atau mendengar cakera padat, filem atau kaset | 10.00                                           | ( )                              |
| 6    | Perkhidmatan-perkhidmatan lain bagi membolehkan pemohon mengakses maklumat secara fizikal                                                                    | Kos Sebenar                                     | ( )                              |
| 7    | Fotokopi (jika ada)                                                                                                                                          | (a) 20 sen setiap muka surat<br>(b) Kos sebenar | ( )                              |
| 8    | Salinan cakera padat, filem atau kaset                                                                                                                       | Kos sebenar                                     | ( )                              |

"Membangun Bangsa Memakmur Negeri"







## Lampiran 4



Kantor Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor



Ruang pendaftaran kasus kekeluargaan di Mahkamah Syari'ah Selangor



Contoh proses perundingan Majelis *Ṣulḥ* di Mahkamah Syari'ah Selangor



Salah seorang Pegawai *Ṣulḥ* yang bertugas di Mahkamah Syari'ah Selangor

Lampiran 5

LAPORAN KESELURUHAN  
STATISTIK KES SULH  
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR  
(PERBANDINGAN 2013-2017)

| TAHUN | DAFTAR | SELESAI |       |           | PERATUSAN KES<br>SELESAI (%) * | PERATUSAN KES<br>SELESAI - BERJAYA<br>(%) ** |
|-------|--------|---------|-------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|       |        | BERJAYA | GAGAL | TAK HADIR |                                |                                              |
| 2013  | 2,491  | 1048    | 564   | 666       | 91 %                           | 65 %                                         |
| 2014  | 2,534  | 1045    | 484   | 758       | 90 %                           | 68 %                                         |
| 2015  | 2,598  | 1,144   | 463   | 631       | 86 %                           | 71 %                                         |
| 2016  | 2,972  | 1,325   | 487   | 789       | 88 %                           | 73 %                                         |
| 2017  | 3,367  | 1,363   | 564   | 1024      | 88 %                           | 71 %                                         |

i) Formula Pengiraan Peratusan Kes Selesai :  $\frac{(\text{Berjaya} + \text{Gagal} + \text{Tak Hadir})}{\text{Jumlah Daftar}} \times 100 \%$

ii) Formula Pengiraan Peratusan Kes Selesai - BERJAYA :  $\frac{\text{Berjaya}}{(\text{Berjaya} + \text{Gagal})} \times 100 \%$

## Lampiran 6



جباتن كحاكيمان شرعية مليسيا  
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

Ruj. Tuan :  
Ruj. Kami : JKSM/100-24/5 (14)  
Takwim : 14 Jamadil Akhir 1423  
Tarikh : 23 Ogos 2002

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,  
Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri-negeri

**Arahan Amalan No. 3 Tahun 2002**

**Pemakaian Sulh**

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil. 3 Tahun 2002 pada 7 Mei 2002 di Johor Bahru bersamaan 25 Safar 1423 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung semua kes-kes selepas didaftarkan, hendaklah dengan seberapa segera tidak melebihi 21 hari dirujuk kepada Pengerusi Majlis Sulh dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk sesi Sulh / penyelesaian damai, sebarang persetujuan yang dicapai hendaklah dicatatkan dan dibacakan semula di hadapan pihak-pihak dan terus dipanjangkan kepada Hakim untuk direkodkan Perintah Persetujuan Bersama.

2. Bagi kes yang gagal di peringkat ini hendaklah terus ditetapkan tarikh perbicaraan setelah semua prosiding kes dipenuhi. Bagi maksud pemakaian sistem Sulh ini ianya tidak terpakai ke atas kes-kes Pembubaran Perkahwinan dan Nasab.

Arahan amalan ini berkuatkuasa serta merta.

(Dato' Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab. Rahman)  
Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie  
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

PUTRAJAYA  
2002





جائز كها كمن شرع ماليا

KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia  
Aras 2 & 3, Blok D7, Parcel D,  
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,  
62677 PUTRAJAYA.

Tel: 03-8896 4800

8886 4888

Faks: 03-8899 1633

email: [judgment@syariah.gov.my](mailto:judgment@syariah.gov.my)

Laman Web: [www.jkm.gov.my](http://www.jkm.gov.my)

Ruj. Kami : JKSM.BPKR/100-5/5/2 Jld. 2 (9)

Tarikh : 16 Sya'ban 1431H/  
28 Julai 2010M

**Y.A.A Ketua -Ketua Hakim Syarie,  
Mahkamah-mahkamah Syariah  
Negeri-negeri.**

#### **ARAHAN AMALAN NO. 1 TAHUN 2010**

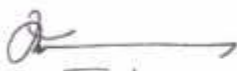
##### **Penentuan Kes Yang Perlu Dirujuk Ke Majlis Sulh Pada Peringkat Pendaftaran Kes**

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahani Amalan Mahkamah Syariah Bil. 1 Tahun 2010 pada 14 Sya'ban, 1431H bersamaan 26hb, Julai 2010 telah bersetuju dan mengesahkan bahawa kes-kes yang dinyatakan di bawah ini perlu dirujuk ke Majlis Sulh semasa peringkat pendaftaran kes di Mahkamah Syariah.

- 009 - Tuntutan Gantirugi Pertunangan
- 016 - Tuntutan Muta'ah
- 017 - Tuntutan Harta Sepencarian
- 018 - Tuntutan Nafkah Isteri
- 019 - Tuntutan Nafkah Kepada Pihak Tak Upaya
- 020 - Tuntutan Cagaran Nafkah
- 021 - Tuntutan Nafkah Eddah
- 022 - Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah
- 023 - Tuntutan Tunggakan Nafkah
- 024 - Tuntutan Nafkah Anak
- 025 - Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak
- 026 - Tuntutan Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak
- 028 - Tuntutan Hadhanah
- 049 - Tuntutan Gantirugi Perkahwinan
- 059 - Tuntutan Hak Tempat Tinggal
- 060 - Tuntutan Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula
- 062 - Tuntutan Isteri Kembali Taat
- 063 - Tuntutan Mas Kahwin

2. Bagi kes-kes ex-parte (interim) tidak perlu melalui proses Sulh.
3. Bagi kes-kes yang telah melalui proses pengantaraan di Jabatan Bantuan Guaman Malaysia tidak perlu dirujuk ke Majlis Sulh pada peringkat pendaftaran
4. Arahan Amalan No. 1 Tahun 2000, No. 9 Tahun 2003, No. 14 Tahun 2004 dan No. 14 Tahun 2005 adalah berkaitan.

Arahan ini berkuatkuasa mulai 30 Julai 2010.



**(Tan Sri Ibrahim Lembut)**  
Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie  
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.  
PUTRAJAYA

## Lampiran 7

**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN**

Nama: Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam

Judul: Efektifitas Majelis *Ṣulḥ* Dalam Mediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**Soalan Wawancara Pegawai Sulh:**

- 1) Bila ditubuhkan Jabatan Kehakiman Syariah di negeri Selangor?
- 2) Bila ditubuhkan majelis sulh di Mahkamah Syariah Selangor?
- 3) Apakah Kelayakan Pegawai Sulh di Mahkamah Syariah Selangor?
- 4) Apakah yang menjadi faktor berhasil suatu Majelis Sulh?
- 5) Kenapa pola yang diterapkan menjadi tarikan para pihak yang menghadiri Majelis Sulh?
- 6) Apakah Tindakan akan dikenakan sekiranya para pihak tidak menghadiri Majelis Sulh?
- 7) Apakah faktor kegagalan Pegawai Sulh dalam menyelesaikan pertikaian di Majelis Sulh?
- 8) Apakah kes yang didaftarkan dalam proses majelis sulh dan kes apa yang paling banyak di daftarkan?
- 9) Adakah cara yang diterapkan majelis sulh memberi keberkesanan dalam peratusan pengurangan kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah?
- 10) Bagaimana pegawai sulh menyelesaikan kes yang tidak berhasil dalam proses mediasi?
- 11) Apakah cara yang diterapkan oleh pegawai sulh dalam menyelesaikan pertikaian keluarga dalam proses mediasi di mahkamah syariah?





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**BORANG SOAL SELIDIK TAHAP KEPUASAN PIHAK BERTIKAI YANG  
 MENGHADIRI PROSES MAJELIS SULH**

**BAHAGIAN A: DEMOGRAFI SILA TANDAKAN ✓ DI DALAM KOTAK YANG  
 BERKAITAN SAHAJA DI BAHAGIAN A INI**

USIA: 18-25 ☐ 26-30 ☐ 31-35 ☐  
 36-40 ☐ 41-45 ☐ 46-50 ☐

STATUS : BERKAHWIN ☐ BERCERAI ☐

KETURUNAN: MELAYU ☐ CINA ☐  
 INDIA ☐ LAIN-LAIN NYATAKAN.....

PEKRJAAN: KERAJAAN ☐ SWASTA ☐ KERJA SENDIRI ☐

KELAMIN : LELAKI ☐ PEREMPUAN ☐

**BAHAGIAN B: PILIH SKALA MENGIKUT PNGETAHUAN ANDA DAN TANDAKAN  
 ✓ PADA KOTAK : (1)YA (2)TIDAK PASTI (3)TIDAK**

**ARAHAN:** Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menilai tahap kepuasan pihak pertikai yang menjalani dan menghadiri Majelis Sulh di Mahkamah Syariah Selangor

| BIL | SOAL SELIDIK                                                                                                                                     | 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1   | Adakah anda mengetahui pelayanan Majelis Sulh di Mahkamah Syariah Selangor                                                                       |   |   |   |
| 2   | Adakah anda pernah mendengar kewujudan Majelis Sulh di bawah Mahkamah Syariah dan jika pernah nyatakan dimana.....                               |   |   |   |
| 3   | Adakah dengan kewujudan Majelis Sulh di bawah Mahkamah Syariah dapat membuka pandangan positif kepada anda dan masyarakat                        |   |   |   |
| 4   | Adakah anda berpuas hati dengan cara yang diterapkan oleh Majelis Sulh dalam proses penyelesaian pertikaian dalam mediasi                        |   |   |   |
| 5   | Adakah anda merasakan Majelis Sulh harus memperbaiki cara penyelesaian kasus yang dilaksanakan                                                   |   |   |   |
| 6   | Adakah anda setuju masa penyelesaian Majelis Sulh dapat menjimat waktu dalam penyelesaian suatu kasus di Mahkamah Syariah                        |   |   |   |
| 7   | Adakah anda berpuas hati dengan kos pembayaran yang dikenakan oleh Majelis Sulh dapat meringankan beban berbanding persidagan.                   |   |   |   |
| 8   | Adakah anda merasakan dengan menghadiri Majelis Sulh dapat mengurangkan tekanan yang di alami berbanding di persidagan                           |   |   |   |
| 9   | Adakah anda merasakan proses mediasi yang dijalankan oleh Majelis Sulh sangat sulit                                                              |   |   |   |
| 10  | Adakah anda berpuas hati pelaksanaan Majelis Sulh dapat membantu menyelesaikan sesuatu kasus di Mahkamah Syariah.                                |   |   |   |
| 11  | Adakah anda berpuas hati penyelesaian kes pertikaian kekeluargaan dalam majelis sulh dapat mengurangkan kasus yang meningkat di Mahkamah Syariah |   |   |   |

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

### **1. Identitas Diri**

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam                                                         |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Selangor, 31 Maret 1994                                                                |
| Jenis Kelamin        | : Laki-laki                                                                              |
| Pekerjaan            | : Mahasiswa                                                                              |
| Agama                | : Islam                                                                                  |
| Status Perkawinan    | : Belum Kawin                                                                            |
| Alamat               | : No 6, Taman Lembah Mewah Bt 15<br>Jalan Semenyih 43000 Kajang,<br>Selangor Darul Ehsan |

### **2. Data Orang Tua**

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Ayah      | : Saiful Nizzam Bin Abdul Rahman                                                         |
| Nama Ibu       | : Umiminarni Binti Dasuki                                                                |
| Pekerjaan Ayah | : Swasta                                                                                 |
| Pekerjaan Ibu  | : Swasta                                                                                 |
| Alamat         | : No 6, Taman Lembah Mewah Bt 15<br>Jalan Semenyih 43000 Kajang,<br>Selangor Darul Ehsan |

### **3. Riwayat Pendidikan**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Sekolah Rendah Kebangsaan          | : Tahun 2000-2006  |
| SAM Sg. Merab Luar                 | : Tahun 2007-2011  |
| Kolej Universitas Islam Melaka     | : Tahun 2013-2015  |
| Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | : Tahun 2016- 2019 |

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Banda Aceh, 16 Jan 2019  
Penulis,

**Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam**  
NIM. 160101129